

integrityto

**BERSAHABAT
DENGAN
TEKNOLOGI
INFORMASI**

KHUSUS
BEREKSPRESI LEWAT
SAKSI, SUARAKAN
ANTIKORUPSI

CENDEKIA
KUATNYA SIKEP
MENJAGA ALAM

JEJAK KASUS
PARA PENERAT
WISMA ATLET



ISSN 2656-0919



VOL 54/MII/
NOV-DES 2016
www.kpk.go.id

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN



KHUSUS 20
BEREKSPRESI
LEWAT SAKSI,
SUARAKAN
ANTIKORUPSI

JEJAK KASUS 6
PARA PENERGAT
WISMA ATLET

UTAMA 10
BERSAHABAT DENGAN
TEKNOLOGI INFORMASI

SEBAGAI GARDA TERDEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KPK SENANTIASA MEMANFAATKAN TI SEBAGAI INSTRUMEN PENTING. MULAI SARANA PERBAIKAN SISTEM, HINGGA MEMPERLUAS DAYA JANGKAU PESAN ANTIKORUPSI.

8
KANAL
 MENANTI IDEALISME PELANGI

28
PORTAL
 AKSI KOLABORATIF MELAWAN PERILAKU KORUPTIF

58
GAGAS
 PENGAWASAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK

60
KLINIK LHKPN
 LAPORAN HARTA MAKIN MUDAH

62
CENDEKIA
 KUATNYA SIKEP MENJAGA ALAM

64
KLINIK GRATIFIKASI
 ATURAN MENIKMATI FASILITAS REKANAN

66
SIMPUL
 Mencari Solusi, Perangi Korupsi

69
KABAR WP
 CARA PEGAWAI KPK MENGUSIR LELAH

70
KOMUNITAS
 MEMBANGUN SPIRIT JURNALISME WARGA

73
JEDA
 JENDELA KEJUJURAN

74
TAHUKAH
 HIDUP SEDERHANA DAN BERBAGI GAJI

76
KAV C-1
 TAK BERLARI BERSAMA SIPUT

MEKANISME PENGADUAN

Pertanyaan: Nn

Pada Program PNPM Pariwisata tahun 2011 di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, mendapat hibah Rp100 juta untuk pengembangan *home stay* dan kelompok kesenian. Namun dalam pelaksanaannya, ada indikasi ketidaktransparanan. Nah, bagaimana mekanisme atau cara melaporkan tipikor yang terjadi di tingkat desa seperti di Wringinputih itu?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Terkait mekanisme pelaporan, Saudara dapat menyampaikan melalui email ke pengaduan@kpk.go.id, telepon (021) 2557 8389, datang langsung ke Gedung KPK, atau secara online melalui KPK Whistleblower's System (KWS) pada <http://kws.kpk.go.id>. Pelaporan harus disertai dengan bukti awal yang cukup.

Tindak pidana korupsi yang dapat ditangani KPK adalah yang memenuhi unsur:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau 3. menyengket kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

MAGANG UNTUK MAHASISWA

Pertanyaan: Erda

Saya Erda Pratiwi, mahasiswa Sosiologi Universitas Sebelas Maret. Saya ingin menanyakan apakah KPK membuka program magang untuk mahasiswa?

Jawaban:

Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini KPK hanya dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan membuat penelitian/skripsi dan tidak dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan melakukan KKL/praktek kerja/magang dikarenakan banyak hal di dalam organisasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa diakses untuk pegawai tetap KPK.



Abdul Mulyadi @HamMulyadi

@KPK_RI KPK harus turun ke bawah, bila perlu sampai tingkat RT. Di sisir.

Boys @biwi147

@KPK_RI Pimpinan KPK semua, Fokus ya bekerja, rakyat selalu di belakang anda-anda semua. Sikat habis jangan pandang bulu. Hanya KPK yang bisa diharapkan.

Agung Berantas @suroyoberantas

@KPK_RI Sukses selalu KPK

Rudy Sayyid @andirsayyidmsh

@KPK_RI Sukses... Jaya selalu KPK RI

Alammulfid @alammulfid

@KPK_RI Ayo KPK, cari koruptornya.

Dadan Sobreng @simpaysiliwangi

@KPK_RI Hukum mati koruptor dan musnahkan bahaya laten korupsi dari NKRI.

Mirizal @Mirizal3

@KPK_RI Saya mendukung KPK dalam penegakan hukum untuk berantas korupsi, sapu bersih, KPK.

Khatier @andi_naqsya77

@KPK_RI Mantap.. Basmi terus tikus-tikus rakus yang mencuri uang negara, bravo KPK.

Sahat A. Situmorang @sahat_28

@KPK_RI Hidup KPK.

M. Denny Akbar Umboh @MDennyAkbarUmb1

@KPK_RI Kalau bisa korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya, ibarat peribahasa bagaikan duri dalam daging. KPK masyarakat selalu mendukungmu.

KIRIM SARAN, KOMENTAR, KRITIK ATAU PERTANYAAN TERKAIT MAJALAH INTEGRITO KE: INTEGRITO@KPK.GO.ID

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Sekretaris Jenderal KPK; **Pemimpin Redaksi** Priharsa Nugraha; **Redaktur Pelaksana** Lufti Avianto.

Staf Redaksi: Abram Sukma Eko Edi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke Suwito, Danu Mahardika, Dyah Prajnaparamita, Ipi Maryati Kuding, Putri Artika Resyakashih, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, Yuyuk Andriati Iskak, Zulkarnain Meinardy.

Kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Angraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo Hutagaol, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam; **Desain & Layout:** MM Setiawan; **Grasis:** Iman Santoso, **Fotografer:** Dian H. Baay, Indra Gunawan, Ramdhani; **Sirkulasi** Venny Irliani Amanah.

Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592 Email integrito@kpk.go.id Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI

PARARATON, KORUPSI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

“Bapa Dang Hyang, perempuan yang bernyala rahasianya itu yalah isteri sang akuwu di Tumapel. Jika demikian, akuwu akan saya bunuh dan saya ambil isterinya, tentu ia akan mati.”

Dalam Serat Pararaton, ucapan Ken Angrok kepada Dang Hyang Lohgawe, tersebut, begitu masyhur. Menunjukkan betapa ambisi untuk merebut kekuasaan dan wanita sudah tertanam sejak dahulu. Membunuh Tunggul Ametung, merebut Ken Dedes, dan kemudian menduduki tahta.

Carut-marut ala Pararaton adalah potret kerajaan di Nusantara. Bahwa intrik politik, perebutan kekayaan dan kekuasaan, seakan menjadi warna yang selalu terlihat menyolok. Dan sesungguhnya, inilah cikal-bakal korupsi di Indonesia. Banyak kerajaan besar di Nusantara hancur, karena polah seperti ini. Selain Singosari yang akhirnya terkena kutuk Empu Gandring, si pembuat keris, masih banyak yang lain.

Sebut saja pertikaian Joko Tingkir dan Haryo Penangsang di Demak atau Sultan Haji yang merebut tahta dari ayahnya yakni Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Bahkan, kehancuran Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, konon juga disebabkan karena perilaku koruptif dan perebutan kekuasaan.

Pararaton atau disebut juga *Katuturanira Ken Angrok* memang bukan kitab sejarah. Namun banyak pakar dapat menerima kesejarahannya kitab tersebut pada tingkat tertentu. JJ. Ras, profesor emeritus bahasa dan sastra Jawa Universitas Leiden, membandingkan Parara-

ton dengan Prasasti Canggal (732), Prasasti Siwargha (856), Calcutta Stone (1041), dan Babad Ranah Jawi (1836). Hasilnya terdapat kesamaan yang jelas dalam karakter, struktur dan fungsi dari teks-teks tersebut serta kesamaan dengan teks-teks historiografi Melayu.

Bisa dibayangkan, melihat cikal-bakal korupsi yang sudah begitu lama, tentu akarnya begitu dalam tertanam di negeri ini. Terlebih dalam berbagai periode sejarah setelah itu pun, nyaris tak ada ruang yang tidak dimanfaatkan korupsi. Mulai kehadiran VOC di Indonesia pencengkeraman ala Hindia Belanda, penjajahan Jepang, bahkan setelah negeri ini merdeka, sejak Orde Lama hingga detik ini, semua tak luput dari korupsi.

Buku *History of Java* karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), misalnya menyebut, selain bangsawan

gemar menumpuk harta, *abdi dalem* pun berperilaku oportunistik dan terlibat pula dalam perilaku koruptif.

Tentu, ini adalah tugas berat kita semua. Mencabut yang sudah tertanam demikian dalam, tentu tak mudah. Terlebih, saat ini pun korupsi sudah bermetamorfosis dan turut mengikuti kemajuan teknologi.

Namun tak boleh ada kata menyerah. Mengambil momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2016, kita berharap semangat pemberantasan korupsi harus selalu digelorakan. Tidak hanya KPK yang saat ini sedang giat memberantas korupsi memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Namun juga masyarakat, harus pula berpartisipasi. Ayol! (*)







G-Five - Juara pavorit audisi SAKSI KPK tampil dalam Konser Suara Antikorupsi di pelataran Pasar Festival GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).

PARA PENGGERAT WISMA ATLET

KRONOLOGIS

Kasus ini diawali saat Nazaruddin (anggota DPR Komisi X) dan Mindo Rosalina (Direktur PT Anak Negeri), meminta difasilitasi oleh Wafid Muharram (Sesmenpora) untuk mendapatkan proyek-proyek di Kemenpora. Dalam prosesnya, Mindo bertemu Wafid dan mengenalkan DP (Direktur PT DGI) dan Mohamad El Idris (Manajer Marketing PT DGI). Proses itu juga dibantu oleh Rizal Abdullah (Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet) yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai kontrak Rp 191,6 miliar.

Akhirnya nilai itu disepakati dan perusahaan Nazarudin, PT DGI dimenangkan. Setelah dimenangkan, Nazaruddin lalu memerintahkan Mindo Rosalina untuk mendiskusikan kepada Mohamad El Idris mengenai fee. Kemudian disepakati pemberian fee sebesar 13% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh.

Mindo dan Wafid ditangkap oleh penyidik KPK setelah transaksi suap senilai Rp3,2 miliar. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mendapati temuan korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemprov Sumatera Selatan oleh Rizal Abdullah dan DP.

KASUS:

SUAP DAN KORUPSI PROYEK
PEMBANGUNAN WISMA ATLET
UNTUK SEA GAMES KE-26
DI PALEMBANG, SUMATERA
SELATAN

**Berikut Tersangka Suap dalam
Pembangunan Wisma Atlet (1-4):**

JEJAK KASUS LAINNYA BISA DIAKSES DI PORTAL

WWW.ACCH.KPK.GOID



TERSANGKA 1

NAMA: MUHAMMAD NAZARUDDIN
JABATAN: ANGGOTA DPR RI

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 7 TAHUN
DENDA: RP 300 JUTA DAN SUBSIDER 6 BULAN



TERSANGKA 2

NAMA: MOHAMAD EL IDRIS
JABATAN: MANAJER MARKETING PT DUTA GRAHA INDAH TBK

VONIS PN

PIDANA PENJARA: 2 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA DAN SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN



TERSANGKA 3

NAMA: MINDO ROSALINA MANULANG
JABATAN: KARYAWAN PT ANAK NEGERI

VONIS PN

PIDANA PENJARA: 2 TAHUN 6 BULAN
DENDA: RP 200 JUTA DAN SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN

**Berikut Tersangka Korupsi dalam
Pembangunan Wisma Atlet (5-6):**



TERSANGKA 4

NAMA: WAFID MUHARRAM
JABATAN: PNS KEMENPORA

VONIS MA

PIDANA PENJARA: 5 TAHUN
DENDA: RP 200 JUTA DAN SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN

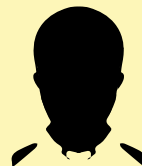


TERSANGKA 5

NAMA: RIZAL ABDULLAH
JABATAN: KETUA KOMITE PEMBANGUNAN WISMA ATLET

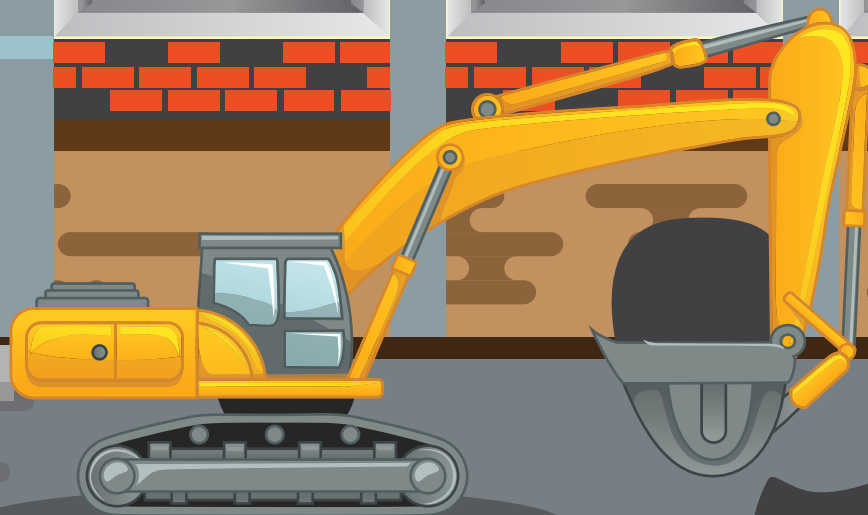
VONIS PN

PIDANA PENJARA: 3 TAHUN
DENDA: RP 150 JUTA DAN SUBSIDER 2 BULAN KURUNGAN

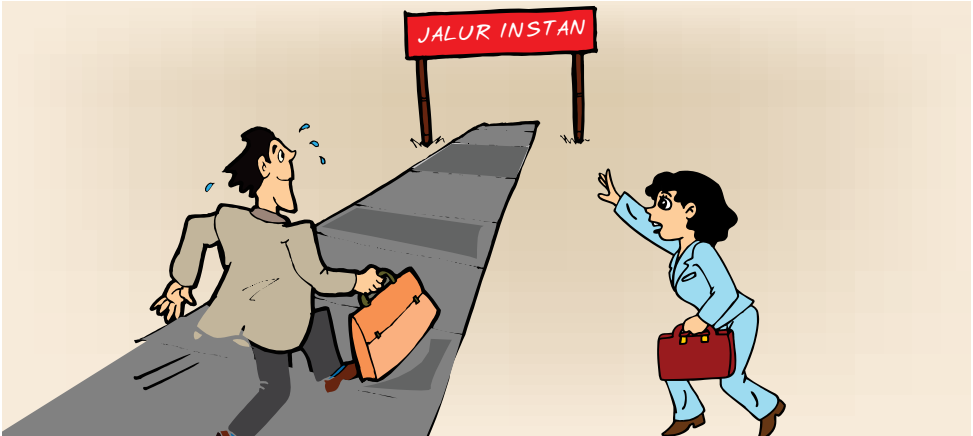


TERSANGKA 6

NAMA: DP
JABATAN: DIREKTUR PT DGI
STATUS: MASIH DALAM PROSES PENYIDIKAN



**KERUGIAN NEGARA
AKIBAT KORUPSI**
RP 54,7 MILIAR



SANDIWARA RADIO

MENANTI IDEALISME PELANGI

Kisah keluarga Hermawan yang bertahan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari menjadi cerita yang menarik. Hermawan yang seorang pegawai negeri di salah satu kementerian berjuang untuk tetap hidup sederhana sesuai dengan gaji yang diterimanya. Beruntung, istrinya, Resti, seorang ibu rumah tangga yang menghargai dan mendukung prinsip hidup suaminya. Resti mampu berhemat dan menahan diri dari godaan konsumtif seperti istri-istri rekan suaminya. Resti dan Hermawan berusaha menerapkan nilai-nilai kejujuran, hidup sederhana dan bekerja keras serta peduli sesama kepada anak-anaknya, terutama si bungsu Pelangi.

Namun, perjuangan mempertahankan prinsip itu semakin berwarna tatkala kehidupan Pelangi yang mulai berubah. Pelangi telah menjadi sarjana dan mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah meninggalkan kampus yang penuh idealisme, ke dunia luas yang penuh realita. Realita bahwa memperoleh pekerjaan tidak mudah. Realita bahwa masih saja ada yang menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai negeri dengan cara gampang lewat sejumlah uang. Realita bahwa, dalam bekerja, ada benturan antara kepentingan perusahaan dengan prinsip hidupnya, yaitu kejujuran.

Kehidupan “nyata” yang bercorak juga se-

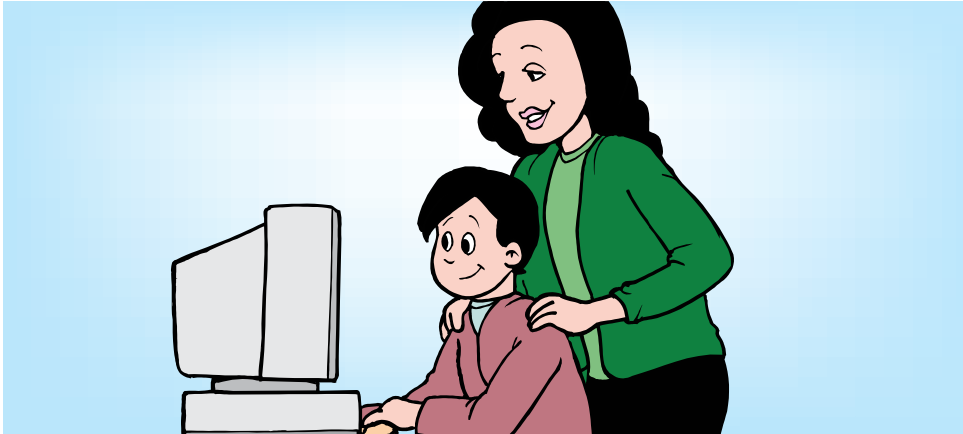
makin jelas ketika Guntur, anak sulung Hermawan dan Senja si tengah, pulang ke rumah setelah berhenti dari tempat mereka bekerja. Dua anak Hermawan itu memilih pulang, daripada harus makan hati bekerja, tapi mengkhianati hati nurani dan nilai-nilai kejujuran di keluarga mereka. Kembalinya Guntur dan Senja di keluarga Hermawan, memberi pencerahan bagi Pelangi, bagaimana harus bersikap saat kondisi perkerjaan tidak sesuai dengan prinsip dan nilai hidup mereka.

Kisah tersebut adalah nukilan dari episode terbaru sandiwara radio “Pelangi Meretas Nurani” yang sudah disiarkan di kanal.kpk.go.id sejak November 2014. Tentu saja episode terbaru ini makin menarik karena jika episode sebelumnya, hanya Pelangi yang hadir sebagai anak Hermawan, pada episode terbaru keluarga Hermawan berkumpul. Plus kehadiran tokoh lain, Valent, guru yang peduli dengan pendidikan anak-anak jalanan. Valent turut menginspirasi Pelangi, bahwa dunia kerja tidak akan memutus kepedulian terhadap sesama, sepanjang tidak menutup mata pada kondisi di sekitar. (*)

Simak Sandiwara Radio Pelangi Meretas Nurani di *streaming* radio kanal.kpk.go.id

Hari	Pukul
Senin – Rabu – Jumat	11:00 WIB





KANAL DONGENG

MENYAMPAIKAN PESAN MORAL

Agar menjadi generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi, penanaman nilai-nilai integritas harus diajarkan sejak usia dini. Tentu saja metode penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak perlu pendekatan yang berbeda. Tak seperti kepada orang dewasa, penanaman karakter kepada anak-anak harus diberikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Melalui dongeng salah satunya.

Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian atau khalayak (fiksi) yang tidak benar-benar terjadi. Selain menghibur, dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral (mendidik). Oleh karena itu, ketika mendengarkan cerita dongeng, anak-anak akan belajar nilai-nilai tertentu tanpa merasa digurui.

Untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada anak-anak, KPK melalui KanalKPK TV juga memiliki program dongeng yang dinamakan Kanal Dongeng. Program dongeng dirasa penting karena bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak maupun guru dan orangtua.

Dalam program Kanal Dongeng, anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai antikorupsi sebagai dasar pembentukan karakter sejak dini. Adapun, nilai-nilai yang dimaksud adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab,

kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Dalam perkembangannya, program Kanal Dongeng terus mencari bentuk yang menarik, kreatif, dan disukai oleh anak-anak. Salah satu bentuknya adalah melalui pembuatan animasi sebagai medium dongeng.

Animasi dapat mewakili imajinasi anak-anak mengenai tokoh kesukaannya. Animasi juga dianggap sebagai penyampai pesan yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi yang disisipkan dalam gambar-gambar kreatif.

Program yang berdurasi 15 menit ini dikemas dengan sajian yang lebih atraktif dan menarik. Hal ini tak lain agar mampu menjadi daya tarik bagi para penonton yang notabene menasar target penonton anak usia 6-10 tahun, guru, dan orangtua. Tak hanya menjadi tontonan, program Kanal Dongeng juga diharapkan mampu menyentuh hal substantif, yakni mampu menggugah para penonton agar senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam program tersebut. (*)

Saksikan Kanal Dongeng di KanalKPK TV di *streaming* kanal.kpk.go.id.

Hari	Pukul
Jumat	13:30 WIB



BERSAHABAT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

SEBAGAI GARDA TERDEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KPK SENANTIASA MEMANFAATKAN TI SEBAGAI INSTRUMEN PENTING. MULAI SARANA PERBAIKAN SISTEM, HINGGA MEMPERLUAS DAYA JANGKAU PESAN ANTIKORUPSI.



Di era mutakhir ini, teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting. Seperti berkejaran dengan waktu, TI tak pernah mengenal kata berhenti. Maka, siapa yang memetakan langkah dan tak mengikuti perkembangan TI, dia akan tertinggal oleh kemajuan zaman.

Dalam konteks itulah KPK terus berlari. Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK

bahkan tidak hanya menjadikan TI sebagai instrumen, namun sekaligus “sahabat.” Tidak hanya dalam upaya penindakan, namun juga dalam pencegahan. “Baik pencegahan maupun penindakan, teknologi informasi menjadi pendukung utama KPK,” kata Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) KPK Hary Budiarto.

Lihat saja dalam berbagai program yang dilakukan, hampir semua menjadikan TI sebagai instrumen penting. Pada upaya penindakan, misalnya, Hary mengatakan bahwa KPK memiliki aplikasi yang disebut Open

Source Integrasi (OSIN) dan Elektronik Koordinasi dan Supervisi (e-Korsup). Sedangkan pada upaya pencegahan, KPK juga mengembangkan aplikasi e-LHKPN, GRATis, *Board Game* Sahabat Pemberani, JAGA, dan sebagainya.



Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, KPK memang menjadikan TI sebagai pendukung kinerja. Karena jangan lupa, korupsi pun berkembang sangat pesat dan bahkan memanfaatkan pula kecanggihan TI. Untuk itu, jika KPK tidak mengimbangi dengan penerapan TI pula, maka sudah dipastikan akan ketinggalan pula.

Semua menjadi bukti, bahwa dalam alur kinerja, KPK senantiasa memanfaatkan TI sebagai pendukung dan bahkan instrumen penting dalam meningkatkan peran sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga menggunakan TI sebagai sarana perbaikan sistem, sarana edukasi dan sosialisasi, pengawasan, dan juga untuk melibatkan partisipasi publik. Tak kalah penting, dengan TI, KPK lebih bisa menjangkau masyarakat sebagai objek, melalui tingkat kecepatan tinggi dan juga *real time*.

Ambil contoh aplikasi e-LHKPN. Sesuai namanya, aplikasi berbasis elektronik tersebut dirancang untuk mempermudah penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan. Aplikasi ini sangat efisien, mengingat jumlah sumber daya manusia (SDM) di KPK yang sangat terbatas. Selain itu, juga memudahkan pelaporan, terutama bagi penyelenggara yang berdomisili di daerah terpencil. Terbagi atas tiga modul: modul pendaftaran (*e-registration*), modul pengisian (*e-filing*), dan modul pengumuman LHKPN (*e-announcement*), diharapkan e-LHKPN bisa meningkatkan tingkat pelaporan LHKPN.

Beyond Corruption

Terkait pentingnya TI dalam pemberantasan korupsi, diuraikan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Menurut Pahala, penggunaan TI akan mendukung konsep pemberantasan korupsi yang disebut sebagai *beyond corruption*. Dalam hal ini, lanjut dia, *beyond corruption* sendiri diartikan sebagai: *pertama*, perbaikan sistem yang akan mencegah terjadinya korupsi. Dan *kedua*, efisiensi dan efektivitas masing-masing sektor yang semakin membaik.

Dalam kaitan itu, lanjut Pahala, pencegahan korupsi di Indonesia yang dikembangkan KPK diarahkan pada perbaikan sistem, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, lanjutnya, jika sistem itu berjalan maka diharapkan semakin menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kata Pahala, instrumen TI sangat membantu dalam mengakselerasi perbaikan sistem dan menjamin transparansi dan akuntabilitas. “Jadi dalam setiap rekomendasi perbaikan sistem dalam suatu sektor atau isu tertentu, sejauh TI dapat diimplementasikan, maka rekomendasi pasti dibuat berdasarkan penggunaan TI yang maksimum,” papar Pahala.

Tetapi memang tidak begitu saja KPK mengembangkan TI. Karena menurut Pahala, TI yang dikembangkan harus mendukung sistem yang lebih transparan. Dalam hal ini, begitu Pahala melanjutkan, secara teknis arah pengembangan yang ditempuh harus sesuai dengan beberapa ketentuan.

Apa itu? Ya, *pertama*, bahwa KPK tidak menciptakan *database* atau sistem baru. Dengan demikian, sistem tersebut lebih merupakan penguatan dan penyempurnaan sistem TI yang ada atau konektivitas dari serangkaian data base yang ada.

Tetapi tidak hanya itu. Untuk syarat *kedua*, Pahala menambahkan, apapun sistem TI yang dikembangkan, harus memiliki daya duplikasi. Artinya ketika instansi lain ingin melakukan hal yang sama, maka hal ini dimungkinkan dengan duplikasi yang ada. “Dan *ketiga*,” kata dia, “Sistem TI yang diprioritaskan adalah yang mudah dioperasikan, murah, serta menjangkau sebanyak mungkin masyarakat.”

Itulah sebabnya, KPK juga tidak semata-mata mengembangkan sistem yang dimiliki. Selain itu, kata Pahala, juga menyebarkan *best practice* sistem *e-government* Pemkot Surabaya ke berbagai daerah lain. Melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan dan Penindakan (Korsupdak-gah), KPK berusaha mendorong penerapan teknologi informasi sebagai upaya pemberantasan korupsi. “KPK mengadopsi beberapa aplikasi Pemkot Surabaya dan disebarakan ke daerah lain, khususnya bagi para kepala daerah yang baru dilantik,” jelas Pahala. (*)



SOFT LAUNCHING APLIKASI- Ketua KPK Agus Rahardjo bersama para pemangku kepentingan terkait saat peluncuran aplikasi JAGA di Gedung KPK (26/7/2016).

INTEGRITO

STRATEGI KPK MENGEMBANGKAN APLIKASI

DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI (TI), KPK BERDASARKAN PADA STRATEGI DAN PENDEKATAN YANG SELAMA INI DIJALANI. PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN, SEMUA MEMANFAATKAN APLIKASI.

Beginilah Grato, sang penjelajah. Dalam taman gratifikasi, robot lucu itu tak hanya menelusuri namun juga memberi panduan. Dia menunjukkan, apakah suatu pemberian merupakan gratifikasi atau bukan. Jika benar merupakan gratifikasi, Grato juga memberi tahu, bagaimana langkah yang harus dilakukan.

Petualangan Grato dalam taman gratifikasi tersebut, bisa dinikmati publik melalui aplikasi bernama GRATifikasi: Informasi dan Sosialisasi (GRATis). Aplikasi tersebut

dikembangkan KPK agar masyarakat, khususnya penyelenggara negara dan penegak hukum, bisa memahami gratifikasi.

Sebagai salah satu bentuk medium sosialisasi, GRATis dengan Grato sebagai ikon memang disajikan secara menarik. Dapat diunduh melalui Android dan iOS, diharapkan GRATis bisa menjangkau sebanyak mungkin pengguna. Maklum, selain mudah dioperasikan, GRATis juga dibuat agar bisa dinikmati banyak kalangan.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, memang seperti itu arah pengembangan teknologi informasi (TI) yang dilakukan KPK. Selayaknya GRATis, semua sistem dan aplikasi TI yang dikembangkan KPK, lanjutnya, harus mendukung sistem agar lebih transparan.

Sesuai Strategi

Strategi adalah kunci dalam setiap “perTEMPURAN.” Begitu pula dengan pengembangan TI, harus sejalan dengan strategi dan langkah yang selama ini dijalankan KPK. Dengan demikian diharapkan pula, aplikasi bisa berjalan sesuai misi pemberantasan korupsi yang diemban KPK.

Dan terkait strategi, Pahala mengatakan, pada intinya program pencegahan membantu perbaikan sistem. Artinya, membantu mitra KPK dalam mencapai target suatu program. Ketika maksud dari upaya pencegahan tadi dipahami, maka dipastikan tak ada resistensi yang signifikan. “Jadi kami fokus saja pada perbaikan sistem. Untuk masyarakat tentu saja sistem yang lebih terbuka akan lebih baik. Sebab, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat menjadi bagian penting dari sistem itu sendiri,” kata Pahala.

Ketika KPK merekomendasikan sistem pelayanan yang berbasis TI, begitu Pahala memisalkan, maka mekanisme pengaduan dari masyarakat menjadi bagian dari sistem tadi. Sehingga, ketika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, maka dia tahu kemana harus melapor.

Lantas, bagaimana kemajuan dari pengembangan berbagai sistem teknologi informasi yang dilakukan KPK? Menurut Pahala, sebagai sistem yang dibangun dalam tahap awal, berbagai aplikasi tersebut memang

perlu penyempurnaan, termasuk dari sisi konten. Untuk itu pula, KPK masih perlu menyesuaikan sumber daya manusia yang ada agar mampu mendorong proses pembangunan dengan lebih cepat. “SDM KPK perlu lebih diperbanyak untuk percepatan pembangunan sistem TI yang berbasis teknologi terkini,” lanjutnya.

Itulah sebabnya, lanjut dia, ke depan KPK akan segera membangun metoda pengukuran efektivitas sistem TI tersebut. Pembangunan metode tersebut, merupakan keniscayaan, sebagai wujud akuntabilitas pembangunan sistem terhadap upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Karena tren yang menggembirakan, ke depan KPK menargetkan, akan mendorong sebanyak mungkin sistem TI untuk diduplikasikan dari daerah satu ke daerah lain. Pemkot Bandung menyatakan sudah mengembangkan dan memiliki sekitar 400 aplikasi yang terkait dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintah daerah. Pemkot Surabaya, Siak, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Sidoarjo untuk menyebut beberapa daerah yang sudah mengembangkan dan menggunakan sistem IT. Duplikasi dari berbagai praktik baik ini, menurut Pahala, merupakan target KPK dengan mitra kerjanya dalam jangka waktu tidak terlalu lama.

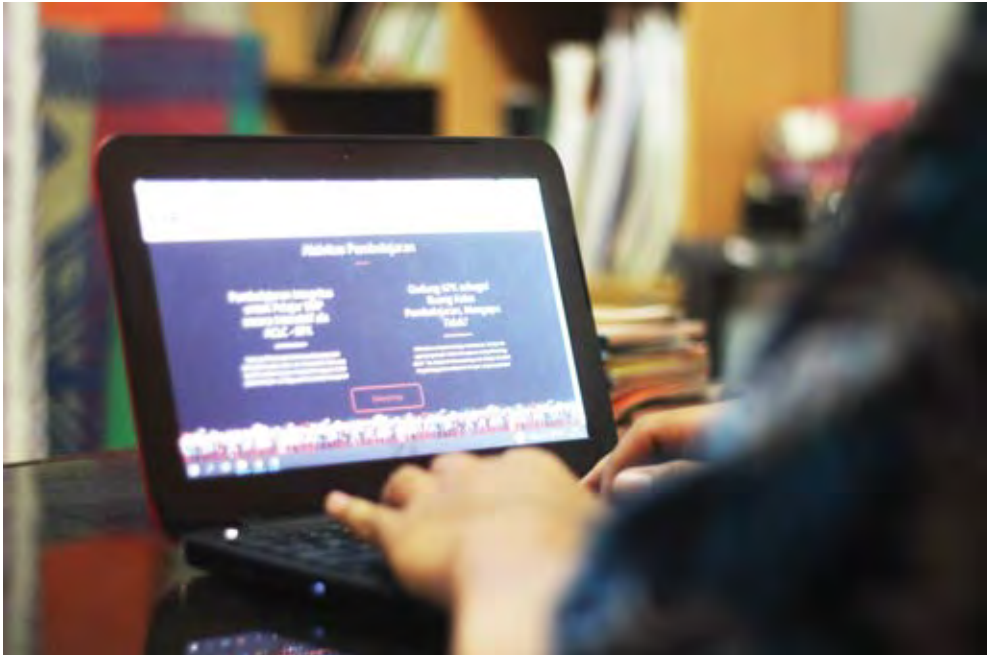
Tiga Aplikasi Besar

Bagai cendawan di musim penghujan, begitulah penerapan TI di KPK yang dengan cepat menyebar di berbagai unit kerja. Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) KPK Hary Budiarto mengatakan, hampir di setiap lini, KPK memang memanfaatkan teknologi informasi. Mulai kegiatan di bidang penindakan hingga pencegahan.

Secara garis besar, ujar Hary, aplikasi di KPK terbagi menjadi tiga. Ada untuk penindakan, *office management*, dan pencegahan. Untuk penindakan, terdapat aplikasi besar, namanya Sistem Administrasi untuk Pengelolaan Kasus (SIMAS). Untuk SIMAS, ujarnya, sistem tersebut merupakan pengelolaan perkara. Mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga masuk eksekusi.

Selain itu, ada pula e-Korsup. Sesuai na-





MENAKSES INFORMASI- Melalui Portal ACLC masyarakat kian mudah belajar materi antikorupsi secara mandiri.

INTEGRITO

manya, KPK mempergunakan aplikasi e-Korsup untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.30 tahun 2002, bahwa KPK melakukan koordinasi dan supervisi pada aparat penegak hukum lain, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. “E-Korsup bisa dibuka di seluruh Polres di Indonesia, seluruh Kajari, dan Kajati. Melalui aplikasi ini bisa diketahui, penyelidikan mana saja yang tidak berjalan. Jika ditemukan kasus seperti itu, KPK langsung turun dan mempertanyakan alasan mengapa kasus tidak berjalan,” kata Hary.

Pada kegiatan penindakan, KPK juga mempergunakan Open Source Integrasi (OSIN) untuk melakukan penelusuran dan identifikasi aset. Bekerja seperti mesin pencari, ketika nama seseorang dimasukkan, maka semua informasi akan terkumpul. Dari data tersebut, lanjut Hary, kemudian dilakukan identifikasi dengan mempergunakan melalui sistem yang disebut I2. Identifikasi tersebut, misalnya, dengan siapa saja orang tersebut berhubungan serta dalam kaitan apa

hubungan tersebut.

Untuk *office management*, terdapat aplikasi e-PIKADE, yang merupakan *head office*-nya KPK. Melalui aplikasi tersebut, keamanan informasi sangat terjaga. Tidak pernah ada surat yang “berkeliaran” kemana-mana untuk menjaga keamanan informasi.

Sedangkan untuk kegiatan pencegahan, KPK mempergunakan aplikasi yang disebut Monitoring Centre Prevention (MCP), yang terdiri atas dua sistem, yakni internal dan eksternal. MCP digunakan dalam rangka untuk koordinasi dan perencanaan program. “Kalau di internal digunakan untuk pelatihan, membuat kebijakan dan perencanaan anggaran. Sedangkan eksternal digunakan untuk riset,” jelas Hary.

Aplikasi Pencegahan

Mencegah dengan aplikasi, inilah yang dikembangkan KPK. Betapa tidak, karena hampir semua lini pencegahan, KPK selalu memanfaatkan aplikasi yang dimiliki. Mulai sosialisasi, kampanye, edukasi, dan sebagainya, semua mempergunakan aplikasi dari

teknologi informasi.

Dari aplikasi besar bidang pencegahan, MCP, KPK pada akhirnya memiliki beberapa aplikasi yang dipergunakan sesuai fungsi masing-masing. Seperti ditambahkan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, selain GRATIS yang dibahas di bagian awal, KPK masih memiliki beberapa aplikasi lain. Untuk pelaporan LHKPN, misalnya, KPK mengembangkan sistem e-LHKPN. Aplikasi ini, menurut Pahala, untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi dan melaporkan LHKPN dengan tepat waktu. Segmen yang dituju, adalah para wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan. Melalui sistem pelaporan LHKPN berbasis elektronik ini, menurut Pahala, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Untuk pelaporan gratifikasi, KPK juga mengembangkan sistem e-Gratifikasi. Tujuannya, memudahkan PNS melaporkan setiap pemberian gratifikasi yang diterimanya. Melekat dengan sistem ini, lanjut Pahala, adalah *e-learning* tentang gratifikasi yang merupakan sumber informasi mengenai gratifikasi di Indonesia. Dengan sistem TI ini, diharapkan kepatuhan pelaporan meningkat serta informasi tentang gratifikasi dapat dipahami PNS secara luas.

Sementara, untuk memperluas jangkauan pendidikan dan pelayanan masyarakat, KPK mengembangkan portal Anti-Corruption Learning Centre. Menurut Pahala, portal ini masih baru dan sedang dalam tahap pengembangan konten. Melalui portal ini, diharapkan masyarakat luas bisa memperoleh informasi dan substansi antikorupsi berdasarkan kebutuhannya maupun untuk kepentingan penyuluhan secara mandiri.

Aplikasi lain, kata Pahala, adalah *boardgame* antikorupsi. Aplikasi ini, juga merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung perluasan media pembelajaran antikorupsi. “Dengan *boardgame*, masyarakat luas dapat mengakses dan diharapkan memperoleh pemahaman tentang korupsi dan pencegahannya,” jelas Pahala.

Selain itu, KPK juga mengembangkan aplikasi JAGA. Aplikasi ini, menurut Pahala merupakan upaya KPK untuk meningkatkan mutu pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan dana desa.

Bahkan, pelayanan dalam bentuk kemudahan perizinan bagi masyarakat juga merupakan bagian dari aplikasi ini. Filosofi aplikasi ini, dengan semakin banyak masyarakat memonitor berbagai pelayanan publik, akan semakin terjaga pengelolaan dan layanannya.

Dari aplikasi JAGA, masyarakat bisa memantau beberapa layanan publik. Misalnya pada Aplikasi JAGA Sekolahku. Aplikasi ini ditujukan agar masyarakat dapat memonitor proses pengelolaan sekolah baik pengelolaan keuangan maupun sumber daya lain, seperti sarana dan prasarana serta guru yang ada. Sistem ini, kata Pahala, bersandar pada *database* yang dikembangkan Kemendikbud serta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten serta sekolah masing-masing.

Lain halnya dengan JAGA Rumah Sakitku. Aplikasi tersebut ditujukan bagi pengguna fasilitas pelayanan rumah sakit. Dalam aplikasi ini, masyarakat bisa mengecek fasilitas serta ketersediaan pelayanan, baik tenaga medis, obat, serta tempat tidur. JAGA Rumah Sakitku, kata Pahala, mengandalkan *database* yang dikembangkan dan di-*update* oleh masing-masing rumah sakit yang terkoneksi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kemenkes.

Begitu pula dengan JAGA Puskesmasku. Menurut Pahala, aplikasi tersebut ditujukan secara spesifik untuk masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas. Sistem tersebut berisi seluruh informasi yang terkait dengan Puskesmas, mulai dari sumber daya yang tersedia hingga jadwal atau rencana kegiatan Puskesmas yang menyangkut masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan, vaksinasi, dan sebagainya.

Sedangkan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan, KPK menyediakan JAGA Perizinanku. Menurut Pahala, aplikasi tersebut merupakan sistem yang dibangun di atas sistem TI pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dikembangkan masing-masing pemerintah daerah. KPK memfasilitasi sistem TI yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui persyaratan permohonan izin tertentu, jangka waktu proses, biaya yang dibutuhkan, status permohonan yang sudah disampaikan serta bila ada keluhan maka disediakan jalur untuk penyampaian. (*)



PELAYANAN- Dengan aplikasi JAGA masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengawasi setiap pelayanan publik, termasuk di rumah sakit.

INTEGRITO

SAAT MASYARAKAT MERASAKAN MANFAAT

APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) YANG DIKEMBANGKAN KPK DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT. SEBAGAI SUBJEK DAN OBJEK APLIKASI, MASYARAKAT MERASAKAN BETUL MANFAATNYA.

Dalim tak lagi berprasangka. Hanya dengan “mengutak-atik” ponsel Android miliknya, warga Kampung Sawah Jatimurni, Bekasi, itu merasa jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Sekarang, dia tidak lagi menduga-duga, kemana “larinya” anggaran SDN Jatimurni I Bekasi, tempat Zaki, anaknya, bersekolah.

Ketenangan Dalim tak lepas dari aplikasi JAGA Sekolahku, yang diunduh lewat *Play-store* di ponselnya. Melalui aplikasi tersebut, dirinya sekarang bisa mengecek profil dan fasilitas sekolah yang ada, termasuk anggaran

yang dikelola. “Aplikasi ini sangat membantu saya sebagai orang tua murid untuk bisa memantau semua anggaran sekolah termasuk penggunaannya. Bahkan profil sekolah, jumlah fasilitas yang ada, termasuk tenaga pengajar, semua tersedia di aplikasi ini. Begitu juga dana BOS, semua lengkap,” kata Dalim.

Tetapi, bukan hanya itu yang membuat Dalim tenang. Melalui aplikasi tersebut, dia tidak hanya bisa memantau. Selain itu, dirinya juga bisa melaporkan, jika terdapat dugaan penyelewengan anggaran oleh sekolah.

Sebagai anggota masyarakat sekaligus orang tua murid, Dalim pantas bersyukur dengan adanya aplikasi yang diluncurkan KPK tersebut. Karena seperti diketahui, selama ini sektor pendidikan memang termasuk rawan terhadap penyelewengan anggaran. Lihat saja media massa, yang begitu marak memberitakan mengenai berbagai dugaan penyimpangan dana pendidikan oleh sekolah, termasuk dana BOS.

JAGA Sekolahku, merupakan salah satu aplikasi JAGA yang diluncurkan KPK. Melalui aplikasi berbasis teknologi informasi (TI), tersebut, diharapkan bisa menggugah peran serta masyarakat untuk turut terlibat. Bahkan, tidak hanya bagi sektor pendidikan, namun juga bagi sektor strategis lain, seperti sektor kesehatan dan sektor perizinan.

Mendukung Kementerian Terkait

Bukan hanya masyarakat seperti Dalim yang merasakan manfaat aplikasi JAGA. Bahkan, pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait pun merasakan hal yang sama. Seperti diakui Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad. Hamid mengatakan, aplikasi JAGA sangat mendukung berbagai sistem yang dimiliki Kemendikbud, terutama Ditjen yang dipimpinya. “Melalui JAGA, diharapkan bisa menjaga Rp45 triliun dana yang dikelola Kemendikbud untuk berbagai sekolah di Tanah Air,” kata Hamid.

Tidak hanya mengawal dana BOS yang jumlahnya luar biasa besar. Hamid mengaku, Kemendikbud juga memanfaatkan aplikasi JAGA untuk mengawal berbagai program lain Kemendikbud. Misalnya, program sarana

pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah, membangun sekolah baru, dan sebagainya. “Aplikasi yang kami miliki akan kami coba *link*-kan dengan JAGA,” lanjut Hamid.

Melalui koneksi antar aplikasi tersebut, Kemendikbud mencoba mengurangi penyaluran bantuan berdasarkan pengajuan proposal. Sebab, diakui Hamid, memang banyak modus penyelewengan dana melalui pengajuan proposal. Sekolah-sekolah, misalnya, banyak yang “pintar” membuat proposal sehingga terlihat bahwa seolah-olah kondisi sekolah tersebut memang membutuhkan bantuan anggaran rehabilitasi. Padahal, kondisi sekolah sebenarnya masih baik, tidak seperti digambarkan melalui proposal tadi.

“Kalau boleh saya tegaskan di sini, aplikasi JAGA ini memang yang nanti akan menerima data-data di tempat kami. Jadi menerima data, menerima laporan, dan mungkin menerima segala macam yang dikeluhkan masyarakat sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti,” tegas Hamid.

Tidak hanya pendidikan di bawah Kemendikbud, sektor pendidikan dan kesehatan juga merasakan manfaat aplikasi JAGA.

Seperti diungkapkan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamarudin Amin, aplikasi JAGA sangat bisa bersinergi dengan sistem yang dimiliki Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, yaitu Egitation Managemen Information System (EMIS).

Sinergi kedua sistem tersebut, menurut Amin menjadi sangat penting, karena Ditjen Pendidikan Islam juga mengelola anggaran yang sangat besar. Menurut Amin, Kementerian Agama mengelola anggaran pendidikan lebih dari 20% pendidikan nasional. Anggaran tersebut cukup besar, karena jumlah lembaga pendidikan Islam juga banyak. Misalnya, jumlah madrasah adalah 76 ribu dengan jumlah siswa hampir 10 juta orang. Itu belum termasuk perguruan tinggi Islam, yakni sekitar 700 lembaga dengan juga mahasiswa sekitar 700 ribu orang atau sekitar 15% dari jumlah mahasiswa nasional.

Untuk mengelola anggaran yang besar itulah, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki sejumlah sistem informasi. Di antaranya, menurut Amin, Sistem Informasi Sarana Prasarana, Sistem Informasi Tatakelola BOS, Sis-



PERIZINAN- Pelayanan perizinan juga menjadi salah satu sektor yang bisa dipantau siapa saja melalui aplikasi JAGA.

ELSHINTA

tem Informasi Guru, dan sebagainya. “Dan untuk mendukung semua itu, saya kira memang semua bisa di-link-kan dengan JAGA. Kami akan mendukung sinergi tersebut,” kata Amin.

Begitu pula untuk sektor kesehatan, aplikasi JAGA juga sangat mendukung berbagai sistem di Kementerian Kesehatan. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Agus Hadian Rahim, berbagai sistem yang saat ini dibangun Kemenkes, termasuk sistem aplikasi RS Online, nanti akan disinergikan dengan JAGA sehingga menjadi lebih terbuka.

Rahim mencontohkan, bahwa pada turunan RS Online terdapat aplikasi Sistem Rawat Inap (Siranap). Sistem tersebut, menurut Rahim, bisa membantu masyarakat agar tidak lagi kesulitan mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur, baik di RS pemerintah pusat, daerah, dan kota. “Dan itu akan menjadi bagian dari informasi publik yang akan terpampang dan nantinya akan masuk di aplikasi JAGA ini,” kata dia.

Aplikasi Lain

Aplikasi JAGA pun bukan satu-satunya aplikasi KPK yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Para pengguna aplikasi lain seperti e-LHKN, *boardgame* Sahabat Pemberani, Gratifikasi: Informasi dan Sosialisasi (GRATIs), dan sebagainya pun sama. Semua

merasakan betul manfaatnya.

Dominggus, pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di wilayah timur Indonesia adalah salah satunya. Melalui aplikasi GRATIs, pria berusia 30 tahun tersebut tak lagi bingung terkait pemberian yang diterimanya. Jika pemberian tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi, dia juga tak lagi bertanya-tanya mengenai teknis pelaporannya kepada KPK.

Wibowo, seorang penegak hukum di Malang merasakan manfaat aplikasi e-LH-KPN. Sekarang dirinya tak lagi bingung jika harus melaporkan harta kekayaannya. Selain mendapat panduan, dia juga tak perlu melaporkan langsung ke Jakarta. Karena melalui e-LHKPN, semua laporan bisa dilakukan secara *online*. “Sangat praktis dan tidak membutuhkan biaya besar,” kata dia.

Sedangkan Fadil Ramadhan, mahasiswa Jurusan Public Relation Universitas Gunadarma mengaku senang dengan *boardgame* Sahabat Pemberani yang baru-baru ini diluncurkan KPK. Menurut Fadil, aplikasi tersebut memberi manfaat yang luar biasa bagi dirinya selaku generasi muda. “Melalui permainan tersebut, saya secara tidak langsung bisa mendapatkan edukasi dan pemahaman terhadap bahaya laten korupsi. Hal ini penting, karena bisa menggugah kesadaran untuk bisa berkontribusi secara aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia,” kata dia. (*)

APLIKASI TI KPK

Siap BerAKSI

Siap BerAKSI adalah aplikasi edukasi yang bertujuan untuk menyuarakan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui aplikasi ini masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai tindakan korupsi, cara memberantas, dan apa yang harus mereka lakukan untuk berperan.



Tahun dibuat: 2013



Jumlah unduhan: 5 ribu



Media Pengunduh: iOS dan Android

JAGA

JAGA adalah upaya KPK untuk meningkatkan mutu pelayanan publik pada strategis, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana desa, bahkan pelayanan perizinan. JAGA melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan dan melaporkan penyimpangan sekaligus mendorong dan melibatkan pemerintah untuk meresponnya.



Tahun dibuat: 2016



Jumlah unduhan: 1 ribu



Media Pengunduh: iOS dan Android

Sahabat Pemberani

Sahabat Pemberani adalah sebuah game antikorupsi yang dapat dimainkan bersama teman dan keluarga, hingga 4 pemain. Permainan ini dirancang untuk merangkul semangat antikorupsi serta menjadi terobosan baru dalam mengajarkan anak mulai dari kecil untuk menolak setiap tindakan yang mengarah kepada korupsi.



Tahun dibuat: 2016



Jumlah unduhan: 500 ribu



Media Pengunduh: iOS dan Android

GRATIs (GRATifikasi: Informasi dan Sosialisasi)

GRATIs dibuat agar penyelenggara negara dan penegak hukum bisa memahami gratifikasi secara utuh dan mudah. Materi disampaikan dalam bentuk animasi untuk mengajak pengguna mengalami langsung sebuah peristiwa gratifikasi dan bagaimana mengambil langkah yang tepat atas peristiwa tersebut. Aplikasi ini juga menyediakan kumpulan referensi seputar gratifikasi yang dikemas dalam sebuah buku pintar dan permainan.



Tahun dibuat: 2014



Jumlah unduhan: 5 ribu



Media Pengunduh: iOS dan Android

KanalKPK

KanalKPK adalah saluran media audio dan visual Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang menyediakan informasi kegiatan KPK dan sosialisasi antikorupsi dalam bentuk audio dan video. Melalui format *streaming*, jangkauan dan kebermanfaatannya sosialisasi pemberantasan korupsi bisa lebih luas.



Tahun dibuat: 2015



Media Akses : <http://kanal.kpk.go.id>

Portal ACLC

Portal Pembelajaran Antikorupsi berbasis online ini dikembangkan oleh Anti-Corruption Learning Center (ACLC). Melalui portal ini masyarakat bisa memperoleh informasi dan substansi antikorupsi berdasarkan kebutuhan secara mandiri. Masyarakat juga bisa mengakses sejumlah modul pembelajaran elektronik seperti Modul Konflik Kepentingan dan gratifikasi disertai contoh kasus dan ilustrasi.



Tahun dibuat: 2016



Media Akses : <http://aclc.kpk.go.id>

KHUSUS

BEREKSPRESI LEWAT SAKSI, SUARAKAN ANTI KORUPSI

*Apa yang kau cari hai penguasa?
Duduk santai di singgasana
Sengaja nikmati yang bukan haknya
Tuk puaskan nafsu dan hasrat dunia
Satukan suaramu
Suara kita semua
Berantas korupsi
Satukan aksi
Lawan! Lawan! Mereka bukanlah kawan
Bui! Bui! Mereka tak bernurani*

Surabaya Town Square seperti diguncang gemuruh. Lirik lagu beraliran rock alternatif di atas, menjadi sihir bagi pengunjung yang datang memadati mall dengan konsep semi terbuka itu.

Dengan lirik persuasif dan komposisi aransemen yang baik, penampilan GEA memang sangat memukau. Ketika sang vokalis



AKSI PANGGUNG- Grup Musik Cupumanik tampil sebagai bintang tamu dalam audisi Festival Suara Antikorupsi 2016 di Bandung Sabtu (10/10/2016).

INTEGRITO

Luckman Nizar bergerak lincah mengitari panggung, penonton sesekali turut bernyanyi, mengikuti lafal bait-baitnya. Bisa dimaklumi, karena lirik lagu berjudul *Satukan Suara, Lawan!* tersebut memang sederhana, lugas, dan mudah diingat.

Grup band GEA bukan satu-satunya yang mengguncang Surabaya Town Square, pekan terakhir September lalu. Tercatat sembilan band lain yang membawakan lagu-lagu bertema antikorupsi. Mereka tampil dalam audisi Festival Suara Antikorupsi (SAKSI) yang digelar KPK.

Selain di Surabaya, audisi juga diadakan di dua regional lain, yakni Bandung dan Yogyakarta. Di Bandung, audisi digelar di Cikapundung Riverspot sedangkan di Yogyakarta diadakan pelataran Taman Budaya. Sama seperti gelaran di Surabaya, audisi di kedua regional lain, masing-masing juga menampilkan sepuluh finalis.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, melalui SAKSI, KPK mengajak seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif memerangi korupsi. Pendekatan yang dilakukan, lanjutnya, adalah melalui seni dalam bentuk lagu, sebagai upaya menumbuhkan nilai-nilai budaya antikorupsi. Hal ini dilakukan, karena seni merupakan bentuk karya universal dan mudah diterima bagi siapa saja. “Siapa pun memang bisa berperan dalam barisan bangsa ini untuk melawan korupsi. Caranya banyak, salah satunya melalui musik,” kata Saut.

KPK berharap, lagu-lagu yang lahir dari ajang ini senantiasa mengiringi, menginspirasi dan menyemangati bangsa ini dalam perjuangan melawan korupsi. Khususnya, merangsang kreativitas dan semangat perlawanan terhadap korupsi di kalangan muda. Terlebih seperti dikatakan Saut, berbagai karya lagu tersebut, memang memiliki pesan antikorupsi yang tegas dan lugas.

“Dengarkan, ada kata lawan, penjarakan. Gamblang sekali lagunya. Dan semoga, lagu-lagu yang terpilih dari finalis bisa menjadi lagu antikorupsi yang abadi,” ujar Saut yang juga menjadi salah satu juri.

Ratusan Karya

Dari hasil audisi tersebut, dewan juri kemudian memilih tiga pemenang di masing-masing regional. Dengan demikian, seperti dijelaskan Ketua Panitia SAKSI Ayu



PENJURIAN- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Edwin Prasetyo (tengah), dan Adie MS (kanan), tengah melakukan penjurian untuk penentuan juara utama Festival Suara Antikorupsi 2016.

INTEGRITO

Nurdiani, secara keseluruhan terdapat sembilan karya pemenang yang berhak tampil pada tahapan *voting*. “Pada tahap *voting* itulah, kemudian juri menentukan siapa juara termasuk juara favorit Festival SAKSI,” kata Ayu.

Para juara tersebut, untuk regional Bandung, juara pertama My Stereo Ill, juara kedua Apeonic feat Mario, dan juara ketiga Duo Alana. Regional Yogyakarta, juara pertama G Five, juara kedua SMC Band, dan juara ketiga Panda. Sedangkan regional Surabaya, juara pertama Gea, kedua No Way Back, dan ketiga Dandelions.

Menurut Ayu, selain memberikan hadiah, KPK juga membuat video klip. Pembuatan video klip yang akan dipergunakan untuk kampanye antikorupsi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan musisi kenamaan di Tanah Air.

Para pemenang memang layak memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kampanye antikorupsi. Mereka adalah yang terbaik, karena jalan menjadi juara memang sangat panjang. Sebelum tampil di tingkat audisi, para finalis harus menyisihkan ratusan peserta lain pada tahap awal yang menampilkan karya dari berbagai jenis aliran musik. Ada rock, pop, dangdut, orkes, reggae, hingga jazz.

Panitia memang memberi persyaratan ketat. Persyaratan itu antara lain, bahwa lirik lagu harus disajikan dalam bahasa Indonesia, bukan merupakan plagiat dan atau saduran (*remix*), tidak mengandung unsur SARA, belum pernah terikat kontrak dengan





perusahaan rekaman manapun, dan belum pernah menang dalam lomba serupa. “Karya lagu juga harus mengandung nilai-nilai anti-korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil,” jelas Ayu.

Selain itu, mereka juga harus melalui berbagai kriteria penilaian yang terukur. Yaitu, 25 persen orisinalitas, 25 persen aransemen, 30 persen konten antikorupsi, dan 20 persen penampilan di panggung saat audisi.

Album Kompilasi

Sesuai tujuan semula, KPK memang menjadikan perhelatan Festival SAKSI sebagai media antikorupsi bagi masyarakat. Itulah sebabnya, KPK

juga menjadikan karya para pemenang dalam bentuk album kompilasi melalui video klip yang diproduseri musisi kenamaan. Dengan adanya album tersebut, karya para pemenang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan lebih luas sebagai media kampanye anti-korupsi.

KPK sendiri yakin, bahwa album tersebut akan diterima masyarakat. Proses seleksi yang sangat panjang dan objektif, menjadi jaminan bahwa karya pemenang merupakan karya terbaik yang kualitasnya tak perlu diragukan.

Seperti disampaikan salah seorang juri SAKSI yang juga mantan basis grup band Dewa 19, Erwin Prasetyo, kualitas para pemenang yang akan





KEMERIAHAN - Penampilan grup Band Cokelat dalam Konser Suara Antikorupsi di pelataran Pasar Festival GOR Soemantri Jakarta, Jumat (18/11/2016).

INTEGRITO

dibuatkan album memang bagus. Karena itu tadi, mereka sudah disaring dari ratusan peserta, sehingga memenuhi kriteria para juri. Jadi secara keseluruhan, kata Erwin, untuk *recording* atau untuk diperdengarkan ke khalayak sudah cocok. Secara aransemen musik juga bagus.

Terkait ketatnya proses seleksi, menurut Erwin, antara lain bisa dilihat dari audisi yang dilakukan. Pada saat audisi di Bandung, misalnya, bahkan diperoleh hasil penilaian yang sama untuk beberapa peserta. Namun setelah juri berdiskusi, akhirnya bisa diputuskan, siapa yang bisa menjadi pemenang pada tahap tersebut dan berhak maju ke tahap selanjutnya. “Ada yang nilainya seri,” lanjut Erwin, “Biasanya kita menentukannya dengan penilaian

yang lebih kekinian. Dalam arti, lagu yang dibawakan bisa merangkul banyak pihak.”

Di sisi lain, Erwin menilai bahwa Festival SAKSI sangat positif. Pasalnya, acara ini bisa melibatkan masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk kampanye melalui karya seni. Untuk itulah dia berharap, bahwa ke depan, KPK akan melanjutkan acara semacam ini demi upaya pemberantasan korupsi dalam bentuk kampanye melalui karya seni. “Karena pemberantasan korupsi bukan cuma menangkap koruptor. Pemberantasan korupsi juga merupakan bentuk penyadaran kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan koruptif,” kata Erwin. (*)



MY STEREO ILL- Juara pertama ajang SAKSI KPK tampil dalam konser SAKSI di GOR Soemantri Kuningan, Jumat (18/11/2016).

INTEGRITO

DEMI SAKSI, TIDUR DI MASJID DILAKONI

KUATNYA TEKAD PESERTA FESTIVAL SAKSI UNTUK TURUT BERKIPRAH, TERLIHAT DARI PERJUANGAN YANG MEREKA LAKUKAN. ADA YANG RELA TIDUR DI MASJID, ADA PULA YANG SAKIT PUN TETAP IKUT AUDISI.

Perjuangan tak mengenal waktu dan tempat. Dalam berbagai kesempatan, ruang-ruang perjuangan selalu tersedia untuk ditempati dan dimanfaatkan. Pilihannya hanya dua, mengambil ruang tersebut, mengisinya, untuk kemudian merebut kemenangan. Atau, meninggalkan dan lantas tak memperoleh suatu apapun.

Itu pula yang dialami grup band My Stereo Ill. Demi berjuang dalam audisi Festival Suara Antikorupsi (SAKSI), mereka rela tidur di Masjid Raya Bandung, bahkan antre di toilet dan mandi di tempat tersebut.

Sebagai peserta asal Jakarta yang mengikuti audisi di Bandung, para personel My Stereo Ill memang mafhum betul bahwa risiko yang mereka hadapi tidak ringan. Terlebih, sejak awal KPK memang tidak memberi fasilitas apapun kepada peserta, termasuk biaya transportasi dan akomodasi pada saat penjurian *live* di masing-masing regional.

“Kita memang pernah tidur di mobil, tapi

lama-kelamaan kan kegerahan juga. Akhirnya kita tidur di masjid, mandi juga kita ngantre di toilet dekat parkirannya. Akhirnya siang kita kita titip barang-barang ke penjaga masjid,” kata Abet, vokalis My Stereo Ill.

Begitupun karena keinginan yang kuat pula, para personel My Stereo Ill tetap melakoni dengan senang hati. Hasilnya tak sia-sia. Tim juri tidak hanya menjadikan mereka menjadi finalis, pada tahap *voting*, mereka juga didaulat menjadi pemenang pertama tingkat nasional.

“Tetapi yang namanya perjuangan, pasti selalu ada *nggak* enaknya, pasti ada pahitnya. Tetapi harus kami jalani. Dan menjadi juara ini pun, kami tetap menganggap sebagai awal perjalanan sehingga perjuangan harus dilanjutkan,” begitu Abet menambahkan.

My Stereo Ill memang layak menjadi pemenang. Selain karyanya memang orisinal dan mencerminkan antikorupsi, aksi panggung mereka juga di atas rata-rata peserta lain. Itu yang membuat tim juri terpujau. Digawangi Abet sebagai vokalis sekaligus *rythm guitar* dan *keyboard*, Echo La pada *bass*, *backing vocal* dan *percussion*, Leean pada *lead guitar* dan *backing vocal*, serta Navi pada *drum* dan *backing vocal*, penampilan saat membawakan karya antikorupsi mereka, benar-benar sangat apik. Iramanya menggugah semangat, perpaduan musik pengiring terasa pas dengan lengkingan merdu sang vokalis.

Tidak hanya itu. Lirik lagu yang dibuat pun sangat mengena dan lugas. Se-

lain sederhana, juga mudah dipahami siapa pun yang mendengar. Simak lirik karya mereka yang berjudul Antikorupsi:

Reff:

*Hari gini oh masih korupsi
Atau minta jatah gratifikasi
Jangan buat bangsa ini sengsara
Koruptor pasti tertangkap KPK*

*Jaman sekarang kerja gak pakai gengsi
Kerja apa saja yang penting gak korupsi
Jangan langsung bilang itu tidak mungkin
Ada jalan kalau masih punya mau*

*Boleh-boleh saja kita banyak mau
Tapi jangan duduk santai dan menunggu
Jangan banyak bicara gak ada fakta
Nasib orang tak pernah bisa diduga*

Antikorupsi, Kerja Tanpa Gengsi

Kuatnya tekad My Stereo Ill, bisa jadi karena sejak awal, para personel grup band tersebut juga menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari keseharian mereka. Bahkan, lirik lagu yang mereka ciptakan pun merupakan refleksi atas apa yang mereka lakukan.

Perhatikan saja penggalan lirik, *Jaman sekarang kerja gak pakai gengsi*. Bukan sekadar pemanis lirik lagu, lirik itu pun sudah jauh-jauh hari mereka implementasikan. Abet misalnya, mengaku bahwa selain berkarya melalui musik dan lagu, dia pun sebenarnya juga bekerja sambil tanpa mengenal gengsi.

BERDO'A-
Rutinitas grup musik My Stereo Ill sebelum memulai aktivitas manggung.



DOK.PRI



BACK STAGE- G-Five menunggu giliran tampil pada konser SAKSI yang digelar KPK pada Jumat (18/11/2016).

INTEGRITO

“Sampai saat ini, saya tetap bekerja sambil menjadi pengemudi ojek *online*,” kata Abet.

Abet mengaku, bahwa lagu yang mereka ciptakan memang banyak terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terkait nilai kerja keras dan kejujuran, namun juga buruknya dampak korupsi yang begitu kasat mata ditemui. Rakyat hidup melarat dan menderita, pelayanan publik yang buruk, semua menjadi buah pemikiran yang akhirnya dituangkan melalui karya lagu tadi.

“Dari sana, saya bersama teman-teman *bikin* lagu antikorupsi. Dan itu memang jiwa kita, yang selalu ingin *bikin* lagu tentang sosial. Jadi sebenarnya agar membuat NKRI menjadi lebih baik. Kita melihat korupsi memang sudah menjadi salah satu masalah Indonesia,” kata Abet.

My Stereo Ill, lanjut Abet, memang berusaha menjadi grup band yang peduli dengan berbagai isu sosial. Antara lain, terkait hak azasi manusia (HAM) dan juga perlindungan anak. Melalui tema tersebut, My Stereo Ill berharap bisa berkontribusi bagi negeri ini, yang saat ini sedang dalam kondisi tak menentu. “Jadi sebenarnya lagu bertema sosial

itu memang wilayah kita,” lanjut Abet.

Kepedulian itu sendiri, sudah ditekankan sejak awal grup band ini terbentuk, 12 Desember 2012. Bahkan secara berkelakar, My Stereo Ill memang ingin memberikan kontribusi bagi negeri ini, sebelum kiamat datang.

Bisa dimaklumi, karena ketika grup band ini dibentuk, memang santer ramalan bahwa kiamat akan datang waktu itu. “Tetapi itu hanya candaan, bahwa sebelum kiamat kita harus bisa *ngerjain* sesuatu lewat band. Yang sebenarnya, kita memang ingin peduli terhadap persoalan sosial bangsa ini,” jelasnya.



Pengorbanan Para Peserta

Berjuang saat melakoni audisi juga diperlihatkan grup band asal Yogyakarta, G Five yang akhirnya menjadi juara favorit tingkat nasional. Seperti disampaikan sang vokalis, Maria Antonia Fabriarni Kristadi, kecelakaan lalu lintas dialami pemain sape grup band tersebut, Uyau Moris. Moris yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan, hanya satu hari sebelum pelaksanaan audisi yang berlangsung di pelataran Taman Budaya, Jl. Sriwedani Yogyakarta pertengahan September

lalu. “Lukanya cukup parah. Kulit tangan kiri dari bahu ke telapak tangan terkelupas, ruas kelingking dan jari manis mendapat empat jahitan, dan kaki kiri dari paha sampai lutut juga luka,” kata Maria.

Tetapi karena tekad pula, G Five tetap mengikuti proses audisi. Bahkan dengan kondisi masih sakit, Moris memaksakan diri hadir pada tahapan tersebut dan ikut bermain. Padahal, kondisinya ketika itu sedang sakit-sakitnya. Dan hasilnya tidak sia-sia. Selain dinyatakan lulus dan berhak masuk pada tahap selanjutnya, juri kemudian juga menyatakan bahwa kelompok musik tersebut berhak memperoleh juara favorit.

Penampilan G Five memang memesona. Membawakan karya mereka berjudul *Berani Jujur*, grup yang juga beranggotakan Andreas Ivan Jensen (*drum*), Joseph Christian Sasongko (*keyboard*), dan Bernandus Setyabudi (*bass*) tersebut, tak kalah memukau. Liriknya sederhana namun lugas, aransementnya juga menarik. Tabuh drum sentuhan *keyboard* yang sesekali dilakukan dengan ritme cepat, begitu harmonis mengiringi setiap lantunan sang vokalis.

*Hapus korupsi dari negeri ini
Buang masa lalu dan bangun negeri baru
Tak kan berhenti perang korupsi
Bersatu, berseru, untukmu negeriku Indonesia
Kita berjanji tuk berani
Kita suarakan antikorupsi
Miliki aksi tuk sadar diri
Berjalan pasti tanpa korupsi
Negeri baru menanti raih dengan langkah pasti
Hapus Korupsi!*

“Kami yakin, bahwa siapapun yang mendengarkan lagu kami pasti akan termotivasi untuk berani berkata jujur, terkait apapun yang mereka lakukan dan mereka lihat.”

Maria Antonia Fabriarni Kristadi,
Vokalis G Five



Menyikapi raihan itu, G Five menyatakan rasa syukur. Menurut Maria, dengan menjadi pemenang favorit, G Five kian termotivasi untuk bisa melangkah lebih jauh, terutama dalam peran serta memberantas korupsi. Termasuk di antaranya, bahwa G Five siap bekerja sama dengan KPK dalam kampanye antikorupsi.

“Kami siap bekerja sama dengan KPK. Dan kami bertekad untuk bisa lebih berkontribusi dalam mewujudkan bangsa ini bebas dari korupsi. Sebab kami yakin, bahwa siapapun yang mendengarkan lagu kami pasti akan termotivasi untuk berani berkata jujur, terkait apapun yang mereka lakukan dan mereka lihat,” kata Maria.

Dibentuk pada 2013, Maria mengaku, bahwa G Five juga fokus terhadap persoalan bangsa, termasuk keragaman suku dan persoalan sosial. Dalam konteks ini, maka yang dilihat adalah negara sebagai satu kesatuan, bukan persoalan parsial yang mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan tertentu saja.

Menurut Maria, G Five memang berorientasi pada kepentingan nasional dan harmonisasi atas keberagaman. Sebab, G Five sendiri sudah terbiasa dengan itu. Selain terdiri atas berbagai suku dan etnis, personel G Five juga memiliki beragam latar belakang sosial dan ekonomi.

Untuk perbedaan suku, ada yang Jawa, Dayak, dan Cina. Sedangkan latar belakang, ada yang berasal dari keluarga pendeta, ada juga dari keluarga pengusaha. “Tetapi kami selalu mencoba menyelaraskan perbedaan tersebut, sehingga komposisi musik kami menjadi sesuatu yang harmonis,” lanjut Maria.

Lebih lanjut Maria mengaku senang bisa ikut berpartisipasi melalui Festival SAKSI. Sebab, menurutnya, SAKSI menjadi pintu bagi G Five untuk mengajak orang lain berkata jujur. Selama ini, dirinya melihat bahwa sebetulnya jumlah masyarakat yang anti-korupsi itu lebih banyak dibandingkan yang korupsi. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah, banyak pula di antara mereka yang antikorupsi, ternyata tidak berani bicara dan hanya memilih diam. Itu sebabnya, lanjut Maria, melalui lirik lagu yang diikuti dalam SAKSI, G Five berusaha mengajak masyarakat untuk berani berkata jujur tentang apapun yang mereka lihat. (*)

IBIC- Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka International Business Integrity Conference (IBIC) di Hotel Grand Sahid Jaya pada Rabu (16/11/2016).



INTEGRITO

PEMBANGUNAN INTEGRITAS SEKTOR SWASTA

Aksi Kolaboratif Melawan Perilaku Koruptif

Bisnis menjadi salah satu sektor yang turut serta dalam menggerakkan perekonomian negara. Namun sayang, terlepas dari peran pentingnya, sektor bisnis acap kali terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dari sejumlah perkara yang ditangani KPK, sekitar 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta. Modusnya, antara lain suap-menyuap atau gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Untuk itulah, sebagai upaya pencegahan, KPK mengajak para pemangku kepentingan untuk melakukan aksi kolaboratif. Aksi bersama dilakukan, melalui Gerakan Praktik Bisnis Berintegritas dengan mengusung slogan Professional Berintegritas (Profit). Program tersebut telah diluncurkan di gedung baru KPK pada Senin (17/10/2016). “Peluncuran Profit kita harapkan tidak sebatas seremonial, tetapi menjadi awal dari

“Agar tidak ada lagi kongkalikong antara penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan para pengusaha hitam, perbaikan sistem juga harus menyentuh ranah dunia usaha.”

Alexander Marwata,
Wakil Ketua KPK.

gerakan bersama memberantas korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Peluncuran Profit merupakan hasil kerja sama *multistakeholder* yang terdiri atas unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Berbagai komponena yang terlibat, di antaranya Ditjen Bea Cukai, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch, serta asosiasi pengusaha.

Menurut Alex, peluncuran Profit merupakan langkah awal dalam pencegahan korupsi di sektor bisnis. Tujuannya, selain menciptakan iklim usaha yang sehat, juga untuk membangun praktik bisnis berintegritas sehingga akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks ini Alex menambahkan, pencegahan korupsi akan berjalan lebih efektif melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan untuk memperkecil celah terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tataran kementerian dan lembaga, per-

baikan sistem tersebut menasar pada sektor bisnis yang dianggap sebagai mata rantai korupsi. “Perbaikan sistem juga harus menyentuh ranah dunia usaha. Agar tidak ada lagi kongkalikong antara penyelenggara negara, aparat penegak hukum dengan para pengusaha hitam,” ujar Alex.

Peluncuran program Profit, sekaligus diikuti dengan peluncuran logo. Pada logo Profit, warna biru merupakan identitas visual utama untuk melambangkan makna dapat dipercaya, dapat diandalkan, rasa aman, serta tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Simbol logo berupa tangan dengan jari telunjuk, menunjukkan simbol “*count me in*” yang bermakna keikutsertaan atau partisipasi para pemangku kepentingan tanpa unsur paksaan dalam rangka memerangi korupsi.

Selain peluncuran Profit, dalam kesempatan yang sama, para pemangku kepentingan yang hadir juga bersama-sama membacakan deklarasi bisnis berintegritas. Hal itu dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen untuk memerangi korupsi dan melaksanakan aksi bersama dalam membangun sistem praktik bisnis yang berintegritas.

Landasan Operasional

Setelah diluncurkan secara resmi, Profit akan menjadi landasan operasional bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan sektor bisnis. Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Utamanya, pada poin Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga.

Bagi dunia usaha, hal ini akan



SIMBOL PROFIT- Simbol profesional berintegritas saat peluncuran Profit di gedung baru KPK Senin, (17/10/2016).

INTEGRITO

berkonsekuensi pada terikatnya komitmen antikorupsi. Antara lain, berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelicin dan suap, serta melaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

Tidak hanya dari sisi pengusaha, program Profit juga mendorong komitmen penegak hukum. Di antaranya, dalam upaya mengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terkait sektor bisnis, serta meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat. “Kita yakin kalau hal itu bisa terwujud, maka Indonesia akan lebih baik,” ujar Alex.

Pentingnya pembangunan sistem yang baik dan seimbang antara pemerintah dan pengusaha juga disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka International Business Integrity Conference (IBIC) di Ho-

tel Grand Sahid Jaya pada Rabu (16/11/2016)). Hal tersebut, kata dia, penting dilakukan sehingga akan mengurangi praktik korupsi di Tanah Air.

JK Mengatakan, salah satu pembenahan yang harus dilakukan, adalah memotong birokrasi agar proses pengurusan perizinan menjadi lebih cepat, sehingga pengusaha tidak perlu memberikan suap untuk membeli waktu. Hal itu, kata dia, telah diupayakan pemerintah melalui pengurusan satu atap dengan waktu yang lebih cepat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Tidak ada pengusaha yang ingin korup sebenarnya. Tetapi karena tidak ada jalan lain untuk mempercepat urusan maka dia membeli waktu. Tetapi banyak juga dalam persaingan membuat begitu. Oleh karena itulah di Indonesia ini bukannya tidak ada aturan bagaimana menghukum pengusaha, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) didirikan untuk mencegah hal-hal itu juga sebenarnya,” kata JK. (*)

PROGRAM “INDONESIA MEMBUMI”

Berantas Korupsi dengan Literasi

Salah satu program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di tahun 2016 adalah melalui medium literasi. Bekerja sama dengan Ikatan Penerbitan Indonesia (Ikapi), KPK meluncurkan program “Indonesia Menggagas dan Menerbitkan Buku Melawan Korupsi (Membumi)”. Tujuannya, mendorong para penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi.

Langkah tersebut dimulai saat peringatan Hari Buku Nasional 2016 yang jatuh pada 17 Mei. Dalam agenda yang dilaksanakan pada Selasa (17/5/2016) di Auditorium gedung baru KPK itu, KPK bersama Ikapi menyelenggarakan sanggar kerja (*workshop*) selama tiga hari. Para peserta adalah puluhan penerbit dari berbagai daerah di Tanah Air. Dalam agenda itu pula, para penerbit, penulis buku dan desainer buku, berkomitmen untuk turut serta dalam penerbitan buku-buku antikorupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, bahwa masyarakat umum memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Oleh karena itu, agenda ini sangat relevan. Kami ingin melanjutkan periode pimpinan sebelumnya untuk memperkuat pembelajaran antikorupsi,” kata Syarief.

Dia menilai, keterlibatan para penerbit dalam penerbitan buku yang berkualitas sangat penting. Menurutnya, saat ini masih banyak buku yang beredar di pasaran belum digarap secara optimal. “Karena saya suka membaca, maka saya juga sering membandingkan kualitas buku. Perlu sekali kita meningkatkan kualitas buku yang terbit di Indonesia,” ujar Syarief.

Resmi Diluncurkan

Dari 36 penerbit yang turut berpartisipasi, setidaknya meng-

“Buku Melawan Korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat,”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

hasilkan 167 buku bertema anti-korupsi. Kategori buku pun bermacam-macam, mulai dari fiksi, nonfiksi, dan faksi. Hasil kerja sama KPK dan Ikapi tersebut akhirnya diluncurkan bertepatan dengan Indonesia International

**GEROBAK**

LITERASI- Panitia memamerkan buku-buku bertema antikorupsi di IBF Rabu (28/9/2016).

INTEGRITO

Book Fair 2016 yang digelar di Assembly Hall JCC, Jakarta, pada Selasa (28/9). Acara tersebut di hadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Ikapi Rosidayati Rozalina, penulis, penerbit, dan para editor yang turut berkontribusi dalam program Indonesia Membumi.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi seluruh pihak yang turut berpartisipasi. Dia berharap, Program Indonesia Membumi mampu menjangkau masyarakat lebih luas dengan buku-buku bermutu dan sarat nilai integritas.

“Program Indonesia Membumi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat,” ujar Agus.

Agus menerangkan, bahwa dengan penyajian yang berbeda pada setiap segmennya, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat dicerna dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga akan terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketua IKAPI Rosidayati Rozalina mengatakan, kerja sama antara IKAPI dan KPK, merupakan suatu langkah besar. Menurutnya, IKAPI bersama lebih dari sekitar 1.300 anggotanya di Indonesia, juga memiliki komitmen untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi. “Kita berharap buku-buku ini bisa menginspirasi masyarakat. Bukan hanya buku anak, tapi juga buku-buku untuk kalangan dewasa secara umum. Itu yang kami harapkan dari acara ini,” ungkapnya.

Rozalina mengaku antusias melaksanakan program tersebut.



BUKU BERINTEGRITAS- Buku-buku hasil kerja sama KPK dan IKAPI melalui Program Indonesia Membumi.

INTEGRITO

Menurutnya, banyak buku yang dihasilkan dari program itu, baik untuk kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa, yang akan bermanfaat. “Semoga buku-buku yang sudah terbit ini bisa menginspirasi masyarakat untuk lebih baik lagi.” harapnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, bahwa peradaban selalu terjaga ketika literasi masyarakat dirawat. Kemiskinan dan ketimpangan sosial, kata dia, bisa dihapuskan bila minat menulis masyarakat semakin meningkat.

“Kalau hari ini ada kemiskinan di mana-mana dan menyebabkan ketidakadilan sosial menjelma di mana-mana karena ada pasar gelap ketidakadilan yang dijual di mana-mana. Itu sebabnya buku ini, situasi ini, masa depan bangsa yang akan datang, harus ditulis dengan baik. Ini adalah bagian dari tanggung jawab

kita semua termasuk para penerbit buku,” ujarnya.

Dalam acara Indonesia Membumi ini, KPK juga memberikan penghargaan untuk buku-buku terbaik. Dari 167 buku antikorupsi yang diluncurkan, KPK memilih beberapa penulis, penerbit, editor dan desain buku terbaik. Adapun, karya-karya terbaik yang diberikan penghargaan oleh KPK, meliputi buku fiksi anak, buku non-fiksi dan fiksi anak, buku non-fiksi remaja, buku fiksi umum, dan penghargaan khusus kepada penerbit buku anak terbanyak.

Selain pameran buku antikorupsi, kegiatan lain yang digelar berupa lomba menggambar dan mewarnai, workshop pembelajaran integritas untuk pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pementasan teater, wisata literasi dan budaya, dan kegiatan literasi lainnya. (*)

SINERGI- Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemrov Banten Selasa (12/4/2016).



SUARA PEMBARUAN

KORSUPDAKGAH TERINTEGRASI

Hindarkan Provinsi dari Korupsi

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, KPK terus berupaya mendorong perbaikan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada 2016, upaya tersebut dilakukan melalui program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Terintegrasi (Korsupdagah). Program tersebut setidaknya telah menyasar sembilan provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Banten, Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Papua Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Melalui Korsupdagah terintegrasi, KPK bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen antikorupsi di wilayah masing-masing. Sebelumnya, KPK memang telah melaksanakan kegiatan serupa. Namun

demikian, pada korsup pencegahan sebelumnya, keterlibatan KPK berbeda dengan tahun ini.

“Jadi, sekarang peran KPK betul-betul sebagai *leader*. Kalau kemarin KPK lebih melakukan koordinasi dan menyerahkan pelaksanaan ke BPKP, maka sekarang KPK yang melaksanakan,” kata Ketua Korsupdagah Sumut Adlinsyah M. Nasution.

Pada korsup kali ini, di samping BPKP, KPK juga menggandeng kementerian/lembaga lain, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan

“KPK tidak hanya beraksi dengan penindakan, namun juga melakukan pencegahan melalui perbaikan sistem.”

Alexander Marwata,
Wakil Ketua KPK.

aparat penegak hukum.

Selain itu, Korsup KPK tahun ini juga dilakukan terintegrasi antara bidang pencegahan dan penindakan. Hal tersebut dimaksudkan agar program pencegahan dan penindakan berjalan seiringan. “Yang tahu persoalan utama sebuah kasus adalah bidang penindakan. Nah, hasil

temuan bidang penindakan tersebut, akhirnya menjadi acuan bidang pencegahan,” katanya.

Usai kegiatan, para pemangku kepentingan melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama. Sementara untuk para gubernur, mereka menandatangani Rencana Aksi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Papua pada Selasa (26/7/2016)), mengatakan, bahwa sejumlah wilayah yang menjadi perhatian KPK adalah daerah dengan prioritas pembangunan dan otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, salah satunya yakni Provinsi Papua.

Kegiatan ini, menurut Basaria, juga menyoroti masih rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Papua untuk melaporkan hartanya. “Kami berharap pejabat di daerah bisa menjadi teladan, salah satunya dalam hal pelaporan harta,” katanya.

Tingkatkan Pemahaman Kepala Daerah

Melalui program ini KPK juga memberikan pemahaman kepada kepala daerah mengenai pencegahan korupsi mulai dari Perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga pada proses pencairan anggaran. “KPK tidak hanya beraksi dengan penindakan, namun yang juga sangat penting adalah pencegahan melalui perbaikan sistem,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menggelar rapat di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan pada Kamis (14/4/2016)).



MENDAMPINGI- Tim KPK bersama para pejabat Pemprov Sumatera Utara saat melakukan kegiatan Korsupdakgah, Jumat (1/4/2016).

RIAUBERTUAH.CO

Alexander mengatakan, dari sejumlah daerah yang dilakukan pendampingan tersebut, pada dasarnya memiliki permasalahan yang sama. Yakni, adanya intervensi pihak luar yang masih kuat dalam hal perencanaan kegiatan dan penganggaran; pengadaan barang dan jasa; serta terkait alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan. Selain itu, belum adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang memadai dan transparan; masih maraknya sikap permisif terhadap perilaku

koruptif; serta pengendalian dan pengawasan yang kurang efektif.

Hal lain yang menjadi alasan KPK adalah belum adanya dampak yang signifikan dari kegiatan pencegahan korupsi selama ini. Seperti disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, bahwa kondisi tersebut bisa dilihat dari rendahnya tingkat pelaporan LHKPN, belum adanya dampak Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), serta belum terlihatnya dampak program Tunas Integritas dan Komite Integritas. (*)

Laporan LHKPN di Empat Provinsi

No	Provinsi	Eksekutif Belum Laporan	Legislatif Belum Laporan
1.	Sumatera Utara	93,75%	97,96%
2.	Riau	49,25%	65,57%
3.	Banten	80,27%	65,88%
4.	Papua	98,36%	100%
5.	Aceh	29,6%	16,6%
6.	Papua Barat	53,6%	25%

Data per April 2016

2016 DAN KELAS PCB

Menanamkan Asa pada Generasi Muda

Selain menjadi generasi penerus bangsa, pemuda memiliki peranan penting dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Perjalanan bangsa Indonesia pun memang tak luput dari kontribusi mereka hingga berhasil merebut kemerdekaan.

Kekuatan kaum pemuda tersebut tentu disadari betul oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan dalam konteks merebut kembali kemerdekaan bangsa, melainkan untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Itu sebabnya, pada 2016 KPK tidak melepaskan fokus pada generasi muda. Upaya yang dilakukan, antara lain, melalui *Anti-corruption Youth Camp 2016* dan Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Melalui kegiatan tersebut, KPK mendorong para generasi muda untuk turut berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial.

Pelibatan masyarakat dalam

perubahan sosial yang dilakukan KPK tentu saja menysar semua segmen masyarakat. Namun, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, generasi muda dipercaya memiliki kekuatan tersendiri. “Karenanya, kekuatan itu juga harus digunakan dalam perjuangan memberantas korupsi,” kata Saut saat membuka *Anti-corruption Youth Camp* di Gapang Resort, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Selasa (18/10/2016).

Karena itu, lanjut Saut, KPK mendorong generasi muda agar terlibat dalam volunterisme dan aktivisme untuk melawan korupsi. Dari kegiatan ini, diharapkan penanaman nilai-nilai anti-korupsi bisa dilakukan secara intensif dengan cara kreatif dan populer dengan keseharian anak muda masa kini.

Saut menjelaskan, terkait perhelatan *Anti-corruption Youth Camp tahun 2016* yang digelar pada Selasa-Minggu (18-

“Pendidikan antikorupsi harus berujung pada tumbuhnya pengetahuan, kesadaran, dan sikap nyata untuk melawan korupsi sebagai musuh bersama.”

Saut Situmorang,
Wakil Ketua KPK.

28/10/2016), tema yang diusung adalah “Dari Kita untuk Negeri”. “*Youth Camp* tahun ketiga ini memiliki konsep *live in* atau berbur di gampong di sekitar Sabang yang nantinya akan menjadi *pilot project* dalam kegiatan serupa,” ujar Saut.

Dalam perhelatan *Anti-corruption Youth Camp* yang me-



DEKLARASI- Para peserta melakukan cap tangan sebagai bentuk Deklarasi Pemuda Sabang Antikorupsi.

ACEHKITA.COM

rupakan hasil kerja sama antara KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Sabang, Sekolah Anti-korupsi Aceh, Mata Aceh, dan Gerak Aceh, para pemuda diikuti dalam tiga tahapan kegiatan. Pertama, tahap penyemaian, dimana para peserta dibekali berbagai materi antikorupsi dari para tokoh yang memiliki pengalaman dalam melakukan perubahan sosial. Tahap kedua, kegiatan difokuskan pada konsep berakar, yakni para peserta tinggal bersama penduduk untuk melakukan intervensi sosial dengan mempraktikkan konsep yang telah disusun pada tahap sebelumnya.

“Pada tahap ini, peserta ditantang untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada, sekaligus membangun kesadaran kolektif seluruh masyarakat gampong dan meletakkan dasar agar bisa dilanjutkan oleh pemuda setempat secara mandiri,” kata Saut.

Setelah menjalani tahap berakar, pada tahap ketiga, kegiatan akan difokuskan pada konsep bertumbuh. Pada tahap ini para peserta saling berbagi pengalaman yang dihadapi selama menetap di gampong masing-masing. Pada tahap ini pula, mereka diharapkan dapat membangun jejaring dan sinergi yang lebih solid dalam merencanakan program perbaikan di daerah asal mereka.

Seperti kegiatan tahun sebelumnya, para peserta *Youth Camp* 2016 juga merupakan generasi muda terpilih yang telah lulus seleksi. Selain diharuskan menulis esai bertema “Peran Pemuda Membangun Negeri,” keikutsertaan mereka juga didasarkan atas rekam jejak dalam kegiatan volunteerisme di tengah masyarakat.

Generasi Politik

Tidak hanya melalui *Youth*



PESERTA SUMUT- Para peserta wilayah Sumatera Utara berfoto bersama usai mengikuti Kelas PCB di Berastagi, Jumat (23/9/2016)

POLITIKCB.OR.ID

Camp. Pendekatan terhadap generasi muda pada 2016 juga dilakukan KPK melalui penyelenggaraan Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (Kelas PCB). Melalui program tersebut, KPK memberikan pembekalan dasar kepada aktor-aktor politik masa depan.

Program Kelas PCB memang menasar generasi muda Indonesia yang saat ini menjabat sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di tingkat SMA/ sederajat dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat perguruan tinggi/ sederajat. Dalam pelaksanaannya, para peserta diberikan berbagai materi dari sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Seperti disampaikan Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano, bahwa program ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan pembangunan politik Indonesia melalui pendekatan perbaikan aktor politik masa depan. Mereka, kata Guntur, dibeka-

li dengan dasar-dasar politik yang cerdas dan berintegritas. “Kalau kita tidak memulai perbaikan politik dari hulu,” lanjut dia, “Tentu politisi dan negarawan yang lahir pada generasi berikutnya tak akan lebih baik dari generasi yang ada sekarang.”

Untuk tahun ini, program tersebut dilaksanakan di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. “Syarat siswa adalah Ketua OSIS, dan mahasiswa sebagai Ketua BEM,” kata Guntur.

Dari program tersebut, KPK berharap akan tumbuh generasi politik baru di masa depan yang memiliki perspektif, sikap dan perilaku politik yang demokratis, berintegritas dan antikorupsi. Selain itu, program tersebut juga bertujuan membuat gerakan dan jejaring politik yang bersih, demokratis dan antikorupsi untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. (*)



REPUBLICA.CO.ID

ANTUSIASME-
Para pelajar
bermain dalam
peluncuran *Play
Day Board Games*
Antikorupsi
di KPK,
Jakarta, Jumat
(15/4/2016).

BOARD GAME DIGITAL ANTIKORUPSI

Tujuh Dimainkan, Satu Diharapkan

Di era mutakhir seperti saat ini, pengaruh digital memang tidak dapat dihindari. Itu sebabnya, meski tak meninggalkan upaya konvensional, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha memanfaatkan teknologi untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya seperti upaya KPK dalam mengedukasi masyarakat melalui *board game* digital antikorupsi.

Upaya itulah yang juga dilakukan KPK pada 2016 ini. Tepat pada hari Jumat (15/4/2016), KPK meluncurkan *game* Sahabat Pemberani versi digital di Gedung KPK. Permainan tersebut, menjadi alternatif KPK dalam menerapkan metode pembelajaran antikorupsi bagi masyarakat. Melalui permainan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan *awareness* masyarakat akan bahaya laten korupsi, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat

"Board Game Sahabat Pemberani diperuntukkan bagi generasi muda. Maka cara penyajian pesan betul-betul diperhatikan."

Laode M. Syarief,
Wakil Ketua KPK.

berkontribusi secara aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, KPK terus berusaha menyesuaikan pesan antikorupsi pada medium yang mudah dicerna untuk berbagai kalangan, salah satunya melalui permainan. Menurut Syarief, hal ini dilakukan, mengingat segmentasi yang ingin disasar adalah generasi muda. "Board Game Sa-

habat Pemberani diperuntukkan bagi generasi muda. Maka, cara penyajian pesan harus betul-betul diperhatikan," katanya.

Sahabat Pemberani sendiri, bukan satu-satunya. Selain itu, terdapat tujuh *board game* lain, yang saat ini sudah bisa dimainkan oleh masyarakat. Ketujuh *board game* tersebut adalah Kesatria yang mengharuskan pemain merampas dan mengembalikan aset negara yang dikorupsi koruptor sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada *board game* Keranjang Bolong dan Terajana untuk mengenal nilai-nilai integritas, antikorupsi, berpikir taktis, dan melatih keberanian.

Khusus untuk menekankan nilai kejujuran disajikan dalam *board game* POLITRIK dan untuk menguji integritas terkait nilai-nilai antikorupsi bagi pelajar/remaja tingkat sekolah menengah ada CSI: Pelajar Hebat.

Board game selanjutnya adalah It's My Business, yang mensimula-

sikan praktik bisnis berintegritas dan terakhir ada D’Hospital yang diperuntukkan bagi kalangan pekerja medis untuk mengatur fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit dengan baik.

Dalam kegiatan peluncuran *game* Sahabat Pemberani, KPK juga meminta saran serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap ketujuh *board game* yang telah diperkenalkan. “Dari sini, kami berharap mendapat *feedback* berupa saran untuk perbaikan. Ketujuh *game* ini punya segmentasi yang berbeda sehingga jangkauan pesan anti-korupsi bisa lebih luas,” kata Syarif.

Dilihat dari karakteristiknya, ketujuh permainan itu tetap memiliki tujuan yang sama, yakni sebagai medium edukasi nilai-nilai antikorupsi. Itu sebabnya, Syarif percaya, bahwa permainan anti-korupsi, baik versi digital maupun konvensional memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung berbagai perubahan positif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan kampanye antikorupsi. Ia berharap, hadirnya permainan tersebut mampu memotivasi berbagai pihak untuk menjalankan hidup dengan penuh integritas. “Kami berharap banyak orang tua, guru, dan para pendidik bisa memanfaatkannya secara optimal untuk menanamkan integritas kepada anak-anak,” lanjut Syarif.

Bagi KPK, pengembangan *game* antikorupsi seperti bukanlah pengalaman pertama. Pada Desember 2015, KPK juga telah meluncurkan permainan lain, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi sedunia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2015). Permainan tersebut adalah Ular Tangga Integritas,



KERANJANG BOLONG- Siswa Sekolah Dasar tengah memainkan salah satu *Board Game* Antikorupsi Keranjang Bolong pada Jumat (15/4/2016).

GATRA.COM

Kuartet Sahabat Pemberani, dan Siap Beraksi. Syarif menambahkan, setiap *game* yang diproduksi KPK itu ada proses uji coba. Dengan demikian, ketika sudah diproduksi bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan seminimal mungkin tidak ada kesalahan.

Media Kampanye Antikorupsi

Setelah diujicobakan pada April lalu, ketujuh seri *board game* yang dikembangkan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK tersebut, kini menjadi medium baru dalam mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat.

Salah satunya seperti yang dilakukan puluhan pelajar SMP Al Azhar Jakarta, di gedung baru KPK, Jumat (20/4). Dua *board game* berjudul Terajana dan CSI: Pelajar Hebat dipergunakan KPK

sebagai pembuka atau pengan-tar materi antikorupsi untuk kalangan remaja.

Dengan didampingi pembimbing yang terdiri para fungsional Dikyanmas KPK, paparan materi yang disisipkan sesi bermain *board game* kepada para peserta, tak hanya membuat mereka tampak ceria, namun juga menjadi lebih fokus saat menyimak materi.

Tak hanya itu, saat ini, ketujuh *board game* tersebut juga dipakai oleh para agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) untuk melakukan sosialisasi di wilayahnya masing-masing. Seperti yang dilaksanakan SPAK di pelataran Monumen Nasional pada Jumat (22/4/2016). Dalam rangkaian peringatan Hari Kartini tersebut, SPAK juga membuka *booth* berisi ketujuh *board game* tersebut dan mengajak masyarakat sekitar untuk menjajalnya. (*)

FESTIVAL ANAK JUJUR

Cara Asyik Tanamkan Nilai Antikorupsi

Tak terbatas pada usia remaja dan dewasa, pencegahan korupsi yang dilakukan KPK juga menyorot kalangan anak-anak. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini sangat penting, karena bisa menumbuhkan tunas-tunas integritas di masa mendatang.

Berangkat dari hal itu, KPK untuk kali pertama menggelar Festival Anak Jujur 2016. Acara digelar di Ecovention, Ancol Jakarta pada Kamis (1/9/2016). Melalui kegiatan ini KPK percaya bahwa penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi anak dapat dilakukan dengan cara-cara yang asyik, mudah, dan menyenangkan.

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari tiga ribu anak yang terdiri dari 50 Taman Kanak-Kanak dan 50 Sekolah Dasar (SD) di Jakarta. “Mudah-mudahan kalau mereka ditanamkan kejujuran, kerja keras, jujur, mandiri, tidak diskriminatif dan adil, mereka akan men-

jadi generasi emas di masa yang akan datang,” harap Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam sambutannya.

Penanaman nilai antikorupsi sejak dini, menurut Agus sangat penting. Sebab, agar seseorang berperilaku antikorupsi, maka sejak dini harus memiliki sikap anti terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Selain itu, lanjut dia, pada saat bersamaan bersikap positif terhadap nilai-nilai karakter baik (*virtues*) dan menjadi kepercayaan dirinya (*beliefs*) sehingga akan menjadi kepribadian (*personality*), dan sistem diri (*self system*).

Agus menambahkan, guna menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi dan cara pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Antikorupsi, imbuh Agus, sudah semestinya bukan hanya slogan se-

“Bukan hanya orang dewasa yang harus tahu kerja KPK. Anak-anak perlu diberitahu bahwa ada lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK yang bertugas menangkap orang-orang yang korupsi,”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

mata. Nilai itu harus muncul dari jiwa yang memahami dan mempraktikkan perilaku antikorupsi dan harus dipupuk sejak dini.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyambut baik gelaran Festival



KETAPEL RAKSASA- Seorang peserta tengah memainkan salah satu permainan dalam Festival Anak Jujur di Ancol Rabu, (31/8/2016).

INTEGRITO

Anak Jujur. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budiman mengatakan, kegiatan tersebut sangat inspiratif dan edukatif. “Memang generasi inilah yang harus kita persiapkan, yaitu generasi emas tahun 2045 yang dibekali keterampilan literasi tinggi dan kompetensi unggul di abad 21,” ujarnya.

Menurutnya, kejujuran merupakan hal fundamental dalam membangun karakter bangsa. Indonesia, kata dia, akan menjadi bangsa besar dan dihormati bangsa lain, jika mempunyai integritas tinggi dengan pemimpin dan generasi muda yang jujur serta bermartabat.

Arie menambahkan, pendidikan karakter bukan hanya menjadi tugas sekolah. Pendidikan karakter, juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat luas. Termasuk di antaranya, peran kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan, bahwa hal utama yang paling mendasar dalam membudayakan karakter baik, adalah melalui penanaman karakter kejujuran atau integritas sebagai salah satu sifat yang mulia.

“Mari kita tumbuhkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita dan kita tumbuhkan lingkungan dan budaya yang jujur yang terintegrasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat,” kata Arie.

Tiga Zona

Dalam Festival Anak Jujur tersebut, KPK membagi ke dalam tiga zona kegiatan, yakni zona literasi, zona musik dan budaya, serta zona permainan. Ketua Panitia kegiatan tersebut Epi Handayani menjelaskan, bahwa sesuai



KERJASAMA- Ketua KPK dan perwakilan dari Kemendikbud tengah mempraktikkan salah satu permainan yang mengedepankan kerja sama pada Festival Anak Jujur di Ancol Rabu (31/8/2016).

INTEGRITO

dengan namanya, Festival Anak Jujur merupakan *event* pembelajaran bagi anak sehingga mereka bisa memahami arti dari konsep kejujuran.

“Ini adalah salah satu festival untuk membangun karakter anak-anak yang jujur. Karena biasanya kita mengkampanyekan antikorupsi kepada orang dewasa. Nah, sekarang kita ingin membangun karakter jujur ini sedari kecil, dan di acara ini kita menasar anak umur 4-12 tahun,” kata Epi.

Zona literasi sendiri menyajikan beragam kegiatan seperti mendongeng, diskusi buku, eksperimen sains, membuat dan menggambar. Kegiatan tersebut, kata Epi, terbagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu pojok cerita, pojok gambar, dan pojok kriya.

Dalam zona bermain, tersedia tiga kegiatan utama, yakni taman bermain yang diperuntukkan bagi anak usia 4-6 tahun, bandar kumpul diperuntukkan bagi anak se-

kolah dasar, dan bale kreasi yang mengajak anak-anak membuat aneka macam mainan. Sedangkan pada zona musik dan budaya, lanjut dia, menampilkan sejumlah pertunjukan seni dan budaya yang terkandung nilai-nilai integritas.

Berbagai permainan tersebut, kata Epi, memang memiliki filosofi tersendiri sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Misalnya tambang riang yang menyajikan permainan tarik tambang tersebut, tidak mengutamakan tujuan. Tetapi, lanjutnya, lebih pada upaya anak-anak untuk bekerjasama dengan temannya. Jadi, lanjut Epi, yang ditanamkan melalui permainan tersebut adalah nilai kebersamaan.

“Kalah dan menang memang bukan tujuan utama. Lebih dari itu, kepada mereka juga ditanamkan kejujuran agar dalam mencapai tujuan, tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang dan menyalahi aturan,” kata Epi. (*)



INTEGRITO

MEDIUM MUSIK-
Grup Musik OM
PSP menghibur
masyarakat dalam
Ngamen Anti
Korupsi di Stasiun
Tugu Yogyakarta,
Sabtu (17/9/2016).

NGAMEN ANTIKORUPSI

Berantas Korupsi di Stasiun Kereta Api

Sepanjang 2016, para penumpang kereta api mungkin melihat aktivitas berbeda di sejumlah stasiun di Tanah Air, khususnya di Pulau Jawa. Panggung musik, syair-syair lagu, dan pesan anti-korupsi, sering mengemuka di antara penumpang naik kereta api maupun mereka yang baru tiba di kota tujuan.

Itu memang bukan konser biasa. Karena di tengah alunan musik yang membahana, terselip makna mendalam tentang upaya perlawanan terhadap korupsi yang kian merajalela. Mengambil tajuk Ngamen Antikorupsi, kegiatan berkonsep konser mini tersebut merupakan terobosan baru yang dilakukan KPK dalam penyampaian pesan antikorupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Kami berharap, sinergi dengan PT KAI ini tak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pesan

“Upaya untuk membangun peradaban baru, peradaban antikorupsi, tidak hanya dilakukan dengan satu cara. Kami punya banyak cara, termasuk di stasiun dan kereta api ini.”

Saut Situmorang,
Wakil Ketua KPK.

yang bermakna bagi masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat mengikuti Ngamen Antikorupsi di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Jumat (13/5/2016).

Di Stasiun Gambir, KPK menggandeng grup musik lawas

Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks (OM PSP). Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI Candra Purnama, Direktur Pengelolaan Sarana Azahari, dan Direktur Aset, Tanah dan Bangunan Doddy Budiawan.

Menurut Saut, musik adalah bahasa universal dalam peradaban manusia. Hampir setiap orang, kata dia, menyukai musik, apalagi saat mengisi waktu menunggu atau di saat luang. Karena, KPK menggunakan musik pula untuk menyampaikan seruan moral kepada para calon penumpang di stasiun. “Musik itu sangat memasyarakat. Jadi kami pikir pesan yang akan disampaikan akan lebih mengena,” kata Saut.

Dia mengatakan, Ngamen Antikorupsi merupakan salah satu upaya KPK dalam mengkampanyekan antikorupsi. Stasiun, kata dia, dipilih mengingat lokasi tersebut merupakan tempat yang

kerap didatangi berbagai lapisan masyarakat.

“Upaya untuk membangun peradaban baru, peradaban anti-korupsi tidak hanya dilakukan dengan satu cara saja. Kami punya banyak cara, termasuk di stasiun dan kereta api ini,” kata Saut saat kembali mengajak masyarakat berdendang di Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu (17/9/2016).

Kegiatan di kota pelajar itu diramaikan grup musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun (PMR). Saut mengatakan, stasiun dan kereta api mampu menggambarkan kondisi negara dan masyarakat Indonesia karena penumpang di dalam satu gerbong kereta api saja berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan kondisi sosial. Oleh karena itu, lanjut dia, KPK menilai bahwa kereta api dan kawasan stasiun menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk mengawasi upaya mewujudkan warga yang memiliki karakter dan berintegritas guna membangun peradaban baru.

Ke depan, lanjut Saut, KPK akan terus berinovasi dan menggandeng lebih banyak lagi para pemangku kepentingan, baik di sektor pemerintah, maupun swasta dan masyarakat sipil. Hal tersebut tentu atas keyakinan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tugas besar yang harus dipikul dan dijalankan bersama-sama agar lebih efektif dan efisien.

Banyak Stasiun

Tahun ini, Ngamen Antikorupsi dilaksanakan sedikitnya di tujuh stasiun. Selain di Stasiun Gambir dan Stasiun Tugu Yogyakarta, sejumlah stasiun lain adalah Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Bogor Jawa Barat, Stasiun Ban-



MENYASAR MASYARAKAT LUAS- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan sosialisasi dan ikut bernyanyi pada Ngamen Antikorupsi di Stasiun Bogor, Jumat (3/6/2016)

INTEGRITO

dung, Stasiun Tawang Semarang, dan Stasiun Gubeng Surabaya.

Di Kota Kembang Bandung, kegiatan Ngamen Antikorupsi juga menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat sekitar. Di tengah lalu lalang calon penumpang Stasiun Bandung, Kota Bandung, grup musik OM PSP juga “meng-goyang” dengan lagu-lagu yang jenaka pada Jumat (9/9/2016). Seperti terjadi di berbagai stasiun, kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang kereta api, baik yang turun maupun mereka yang tengah menunggu pemberangkatan.

Keseruan Ngamen Antikorupsi KPK kemudian berlanjut ke Stasiun Gubeng, Surabaya pada Jumat (23/9/2016). Dalam kegiatan yang dihadiri Walikota Surabaya Tri Rismaharani itu, diramaikan oleh Klanting, sebuah

grup musik anak jalanan asal Surabaya yang sempat melejit dan menjadi finalis di ajang pencarian bakat. Sejumlah lagu daerah pun dibawakan, diantaranya *Tanjung Perak*, *Rek Ayo Rek*, *Surabaya Oh Surabaya*, dan berbagai lagu lain.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani yang turut hadir mengaku bangga dan berterima kasih karena wilayahnya menjadi salah satu daerah yang dipercaya KPK untuk menggelar sosialisasi ini. Seperti KPK, Risma mengatakan, Pemkot Surabaya mengaku terus melakukan berbagai inovasi untuk mencegah perbuatan korupsi, sekaligus membudayakan kinerja antikorupsi. “Kegiatan di tengah masyarakat secara langsung ini bisa mengajak masyarakat terhadap apa yang disosialisasikan,” kata Risma. (*)

WORKSHOP TUNAS INTEGRITAS

Memperkuat Daerah Berbasis Integritas

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.” Demikian ungkapan sarat makna yang terus digembar-gemborkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada seluruh pejabat di provinsi dan lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah. Ungkapan dalam Bahasa Jawa yang berarti “Jangan Korupsi, Jangan Membohongi” ini pun mempertegas komitmen Ganjar untuk membangun Jawa Tengah bersih dari tindak korupsi.

Ganjar sadar, untuk mewujudkan itu harus ada gerakan yang dimotori para pejabat dan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah. Setelah di lingkungan Pemprov, Ganjar menegaskan, “virus” *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*, terus ditularkan ke seluruh kabupaten dan kota, sampai seluruh jajaran pemerintahan memiliki budaya malu korupsi.

Gayung bersambut. Langkah Ganjar ternyata sejalan dengan program *workshop* Tunas Integri-

tas yang juga dilakukan KPK pada 2016. Sebagaimana dikemukakan Ketua KPK Agus Rahardjo, *workshop* Tunas Integritas menjadi sarana untuk memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas. “Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, *workshop* ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan,” tegas Agus.

Agus menambahkan, KPK berharap para pemimpin daerah terinspirasi untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Sebab, kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik,” katanya.

Inisiatif Pemprov Jawa tengah itu pun diapresiasi oleh Ketua

“Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas.”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

KPK Agus Rahardjo. Agus berharap, melalui *workshop* tunas integritas ini akan lahir tunas-tunas yang bisa membangun daerahnya dengan transparan dan akuntabel. “Tentunya KPK berharap tidak hanya di Jateng, tetapi bisa menyebar ke daerah-daerah lain,” ujarnya.

Workshop Tunas Integritas yang digelar di Auditorium Lantai I Gedung KPK Jakarta, Selasa (22/3/2016) ini, diikuti 17 pa-

KOMITMEN- Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), Ketua DPRD Jateng(...) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (ketiga dari kiri) menyaksikan para kepala daerah se-Jateng menandatangani pakta integritas di Gedung KPK pada Rabu, (17/5/2016).



INTEGRITO

sangan bupati/wali kota di Jawa Tengah yang baru dilantik pertengahan Februari lalu 2016. Turut hadir dalam kesempatan itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, Ketua DPRD Provinsi bersama empat wakilnya.

”Ini baru kali pertama di Indonesia. Jawa Tengah memelopori ini karena menyadari betul membangun integritas merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan *clean governance and good government*. Karenanya komitmen integritas mutlak dimiliki, khususnya bagi para pimpinan daerah yang baru dilantik,” ujar Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Sinoeng N. Rachmadi.

Dalam kegiatan tersebut, 17 pasangan wali kota, bupati dan wakilnya beserta perwakilan dari DPRD Jateng menandatangani Komitmen Bersama Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Di dalamnya, terdiri dari tujuh poin kesepakatan, antara lain mengimplementasikan nilai-nilai integritas dan menjadi *role model* di lingkungan pemerintah kabupaten/kota masing-masing, serta melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerbitan perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbuka.

Banten Menyusul

Dalam membangun integritas para kepala dan pejabat daerah, KPK terus menasar daerah-daerah, terutama di wilayah yang disinyalasi memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Selain Jawa Tengah, daerah yang juga mengikuti para pejabat serta bupati/walikota dalam *Workshop* Integritas KPK adalah Provinsi Ban-



KOMITMEN JATENG- Para pejabat Pemprov Jateng dan para kepala daerah mengikuti *workshop* Tunas Integritas di KPK, (22/3/2016).

INSPEKTORAT.
JATENGPROV.GO.ID

ten.

Workshop Integritas yang digelar pada Selasa-Rabu (17-18/5) di KPK tersebut, dibuka secara resmi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan disaksikan Gubernur Banten Rano Karno.

Para peserta terdiri atas delapan pasangan wali kota/bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Kedelapan daerah tersebut terdiri atas empat kota dan empat kabupaten, yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Selain itu, para peserta juga terdiri atas para pimpinan legislatif di provinsi paling barat Pulau Jawa ini, yakni Ketua DPRD Provinsi Banten serta delapan ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.

Ketua KPK Agus Rahardjo sangat mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang memiliki

itikad dan komitmen dalam membangun integritas bagi kepala daerahnya agar terhindar dari kejahatan korupsi. “Saya berharap, para kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi sehingga akan terjadi perbaikan di Banten,” katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi yang dilakukan pada Provinsi Banten. Wilayah ini merupakan salah satu dari enam provinsi yang didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pencegahan. Di sini, KPK mendorong para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. (*)



LITBANG KPK

SMELTER- Salah satu tempat pengolahan hasil tambang di PT Newmon NTB.

GERAKAN NASIONAL KEDAULATAN ENERGI

Agar Energi Berdaulat di Bumi Pertiwi

Bagai benang kusut, inilah sengkabut persoalan energi yang dihadapi bangsa Indonesia. Persoalan energi di negeri kaya raya ini memang cukup pelik. Di antaranya pertama, Cadangan sumberdaya yang sangat terbatas; kedua, Eksploitasi yang berlebihan, tanpa ada strategi untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang; ketiga, Sejarah kelam gagal tata kelola di sektor energi; keempat, Kebutuhan energi yang terus meningkat; kelima, Ketergantungan negara masih dominan terhadap penerimaan negara sektor migas; keenam, Ketidakmampuan pasokan dalam negeri untuk kebutuhan domestik; ketujuh, Mahalnya biaya energi sehingga menimbulkan rendahnya daya saing; dan kedelapan, Praktik kriminal dan pelanggaran administrasi.

Alih-alih bicara energi yang menyejahterakan dan berdaulat, karena faktanya telah terjadi kerugian, keuangan negara, dan negara tidak bisa mengendalikan pasokan, harga, dan rantai nilai

“Perbaikan tata kelola sektor energi dilakukan dengan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

terhadap sektor energi nasional.

Menyikapi ragam persolan sektor energi itulah, pada 2016 ini, KPK mengambil inisiatif meluncurkan Gerakan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi. Gerakan diawali melakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) dengan menggandeng seluruh pihak para pemangku kepentingan. KPK setidaknya menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian ESDM, Kemko Perekenomian, Kemko Maritim, SKK Migas, BPH Migas, Kemkeu, Kemhub, Kemendagri, BKPM, BPKP, BIG, Bappenas, Pemda dan K/L/P (dari pihak

pemerintah); Hulu (K3S), Hilir, PLN, PGN, Pertamina, Pertagas, IPP, NGO, kampus, dan pihak lain terkait.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi atas kegiatan koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan batubara (Korsup minerba) di 32 provinsi, sekaligus meluncurkan Gerakan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi melalui Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Sektor Energi pada Senin (15/2/2016).

Agus menegaskan, KPK akan terus berupaya menyelaraskan kegiatan di bidang penindakan, pencegahan serta koordinasi dan supervisi. “Sinergi tetap akan dilakukan antara pencegahan dan penindakan, terutama untuk kasus besar yang melibatkan penyelenggara negara, terkait dengan uang negara dalam jumlah besar, dan menjadi perhatian masyarakat luas. Tak hanya itu, kami juga akan fokus pada upaya membangun sistem yang kuat,” katanya. Ia menambahkan, KPK mengoptimal-

kan fungsi-fungsi pencegahan untuk mendorong perbaikan sistem, regulasi/kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan serta untuk merangkul partisipasi publik secara luas.

Di sektor energi, lanjut Agus, langkah Korsup mencakup minyak dan gas (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba), Listrik, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang selanjutnya disebut Korsup Energi. “Tentu saja, tujuannya untuk perbaikan tata kelola sektor energi dengan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Agus.

Fokus Kegiatan

Khusus mengenai Korsup Energi, Agus menjelaskan, ada tujuh aspek fokus kegiatan, antara lain Penataan perizinan; Pelaksanaan kewajiban para pihak; Pengawasan dan pengendalian; serta Pengembangan dan integrasi sistem data dan informasi. Tiga lainnya, pemenuhan hak-hak masyarakat; Perbaikan regulasi; dan Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menyampaikan perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Status per Februari 2016, sebanyak 6.365 IUP berstatus Clear & Clean (C&C) dan sebanyak 3.966 berstatus Non C&C,” katanya. Ia menambahkan, capaian tersebut tak lepas dari sejumlah langkah yang telah dilakukan. Antara lain, pihaknya telah bersurat kepada gubernur terkait tindak lanjut Korsup Pengelolaan Pertambangan Minerba pada September 2015 lalu. Selain itu, Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi



ENERGI LISTRIK- Sektor energi menjadi salah satu fokus KPK dengan menginisiasi Gerakan Nasional Kedaulatan Energi.

INTEGRITO

Penerbitan IUP Minerba dalam rangka percepatan evaluasi C&C kepada gubernur paling lambat 90 hari kerja.

Koordinator Koalisi Anti-Mafia Tambang Pius Ginting mengungkapkan, hasil kinerja pemda melaksanakan Korsup Minerba dengan menetapkan sejumlah target. Antara lain; Penataan izin; Pemenuhan kewajiban keuangan; Pengawasan produksi; Pengawasan pengolahan; dan Pengawasan penjualan. pada kinerja penataan izin, ada tiga indikator yang diamati, yakni pengurangan IUP Non C&C, serta pengurangan tumpang tindih hutan konservasi (HK).

“Hasil indeks kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi Korsup Minerba menunjukkan dua provinsi dengan skor tertinggi, yakni Sulawesi Tengah dengan skor 68 dan Kepulauan Riau dengan skor 60,” katanya. Sedangkan tiga provinsi terbawah, kata Pius, diduduki oleh Kalimantan Barat, Sulawesi

Selatan dan Kalimantan Selatan.

Karena itu, kata Pius, Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak dicabutnya seluruh IUP Non C&C dan menagih seluruh piutang negara dan memastikan terpenuhinya kewajiban keuangan setelah IUP dicabut. “Aparat penegak hukum juga harus menindak IUP yang beroperasi di kawasan hutan konservasi, serta memberikan sanksi bagi kabupaten yang tidak melaksanakan pengawasan produksi, pengolahan dan penjualan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mengaku sangat mendukung kegiatan ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Membangun tata kelola hubungan antara pusat dan daerah termasuk penegakan hukum agar bisa ditingkatkan, dalam upaya membangun pemerintah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya menguatkan otonomi,” kata Tjahjo. (*)

PEMBANGUNAN INTEGRITAS SEKTOR POLITIK

Menjaga Parpol Tak Salah Kelola

Lemahnya sistem tata kelola partai politik turut berimbas pada buruknya tata kelola pemerintahan di negeri ini. Masih lemahnya tata kelola parpol juga terlihat dari banyaknya anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPK kemudian membuat kajian tentang Potensi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada. Kajian ini dilatarbelakangi oleh besarnya biaya politik yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, hasil kajian Kemendagri menyebutkan, kisaran Rp20-30 miliar bagi seseorang yang ingin menjadi walikota/bupati dan sekitar Rp100 miliar untuk menjadi gubernur.

Pada 2016 ini, KPK memaparkan hasil kajian tersebut di ruang Auditorium Gedung KPK, pada Rabu (29/6/2016). Selain dihadiri Wakil Ketua KPK La-

ode M. Syarief, kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, dan Sekjen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief kala itu menerangkan, dalam kajian tersebut KPK melakukan studi dengan metode tele-survei terhadap 140 calon kepala daerah dan 146 calon wakil kepala daerah yang kalah dalam Pilkada serentak di 259 daerah pemilihan. Responden dibagi merata berdasarkan klasifikasi kekayaan sumber daya alam atas data laporan realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam.

Adapun ruang lingkup sumber daya yang dimaksud adalah minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, hasil kehutanan, hasil perikanan. Dari kajian inilah, KPK mengidentifikasi potensi benturan kepentingan calon kepala daerah terkait sumbangan Pilkada.

“Untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu pilar yang tidak bisa dilupakan adalah partai politik.”

Laode M. Syarief,
Wakil Ketua KPK.

Hasil kajian menunjukkan, pada aspek pelaporan, pengeluaran aktual Pilkada lebih besar dari harta kekayaan pada LHKPN. Sebanyak 51,4% responden mengeluarkan dana Pilkada melebihi kemampuan harta kas yang dimilikinya. Sebanyak 16,1% responden mengeluarkan dana Pilkada melebihi total harta yang dimiliki. Semua pengeluaran tidak dicantumkan ke dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan



SUASANA KAMPANYE- Parpol harus memiliki integritas untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat bagi Indonesia.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tingkat kepatuhan pelaporan rendah dan isi laporan dimungkinkan tidak jujur serta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Benturan Kepentingan

Di sisi lain, pemberian sumbangan juga menciptakan potensi benturan kepentingan pada saat menjabat pimpinan daerah. Faktanya, mayoritas pasangan calon menerima sumbangan untuk menutupi kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran Pilkada. Hasil kajian menemukan bahwa sumbangan yang diterima tidak semua dilaporkan ke dalam LPSDK. Bahkan, calon kepala daerah menyadari bahwa terdapat konsekuensi saat menerima sumbangan.

Hasil kajian tersebut memperlihatkan, konsekuensi sumbangan yang akan dibayarkan, berupa kemudahan perizinan, kemudahan akses menjabat di pemerintah, kemudahan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, keamanan dalam menjalankan bisnis, mendapatkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah, dan mendapatkan bantuan kegiatan sosial/hibah.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menanggapi kajian yang dilakukan KPK. Menurutnya, hasil kajian KPK merupakan potret realitas yang tidak dapat dielakkan sebagai bagian dari proses demokrasi yang mahal. Ia menyimpulkan, pasangan calon tidak akan *nyalon* tanpa sumbangan dari pihak ketiga, dan sumbangan tersebut tidak akan diberikan tanpa motif. “Berani *nyalon* karena ada donatur atau juga bisa sebagai spekulasi untuk meman-



TRANSPARANSI- Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif memberikan arahan kepada peserta workshop pendanaan parpol di Gedung KPK, Rabu (25/5/2016).

INTEGRITO

cing calon donatur,” katanya.

Menyikapi hasil kajian tersebut, Anggota KPU Ida Budhiati menilai, bahwa kajian ini memperlihatkan semangat KPK dalam mendorong lahirnya kontestasi demokrasi yang transparan, bersih dan berintegritas.

Ida setuju atas rekomendasi KPK mengenai perlunya lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu menyusun regulasi yang kuat agar tidak terjadi pasang-surut sebagaimana terjadi pada peraturan kampanye dan biaya kampanye. “KPU dibebaskan kepalanya, tapi ekornya masih dipegang,” ujarnya.

Selain melalui kajian mendalam, salah satu upaya KPK dalam melakukan perbaikan tata kelola partai politik adalah dengan menggelar Program Perbaikan Tata Kelola Partai Politik Berintegritas yang digelar pada Selasa-Kamis (24-26/5/2016). Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif tersebut

dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik.

Syarief mengatakan, setiap parpol harus memiliki integritas untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat bagi Indonesia. Jika parpol justru menjadi celah bagi orang untuk korupsi, hal itu akan memberi efek domino yang buruk.

“Mau diapakan juga negara ini, tanpa parpol yang berintegritas dan memiliki tata kelola yang baik, cita-cita untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan Indonesia yang adil dan sejahtera akan susah diwujudkan,” ujarnya.

Dari kegiatan itu, KPK kemudian bekerja sama dengan partai politik untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Tentu saja dimulai dengan perbaikan tata kelola di masing-masing internal Parpol sendiri. “KPK tidak mungkin bekerja sendiri, tanpa dukungan dari parpol, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat,” ujar Syarif. (*)



LOKET FARMASI-

Seorang pasien tengah bertransaksi di loket farmasi RS Koja.

INTEGRITO

KAJIAN SEKTOR KESEHATAN

Langkah Sehat di Sektor Kesehatan

Seakan tak tersentuh. Barangkali inilah gambaran yang selama ini terjadi di sektor kesehatan. Padahal bukan rahasia umum lagi, banyak praktik yang ditengarai jauh dari *clean governance* terjadi di sektor kesehatan. Bukan saja masalah pelayanan tetapi juga banyak ragam, seperti belanja obat yang tinggi hingga 40 persen lebih dari belanja kesehatan. Belum lagi keluhan mahalnya harga obat-obatan antara satu nama dagang dengan nama dagang lain namun meski kandungan yang sama. Kemudian, proporsi pemakaian obat generik yang relatif rendah dan persaingan bisnis obat yang ketat. Tak jarang misalnya, suatu perusahaan farmasi mengiming-imingi oknum dokter dengan *sponsorship* yang tinggi dan gratifikasi langsung pada pelaku.

Itulah sebabnya, pada 2016 ini, KPK melanjutkan fokus pada sektor kesehatan. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang,

banyaknya kelemahan sektor kesehatan, selain membuat negara merugi, juga berdampak langsung pada rakyat. “Sektor ini menjadi perhatian banyak orang dan saya berharap, kita harus sama-sama berkomitmen untuk melakukan perbaikan di sektor ini,” katanya di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Saut menambahkan, sebagai salah satu sektor yang penting, sektor kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak secara langsung. Sektor ini juga mengelola dana yang besar sehingga KPK memfokuskan pada perbaikan sistem dan tata kelola, agar lebih optimal memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perbaikan sistem yang dilakukan KPK pada sektor kesehatan memang bukan saja dilakukan pada 2016. Langkah ini bahkan merupakan tindak lanjut dari kajian KPK sebelumnya terhadap Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dipaparkan pada Februari 2014. Dari hasil kajian

“Praktik merugikan negara sekaligus berdampak langsung pada rakyat telah lama disinyalir terjadi di sektor kesehatan. Karenanya perlu pembenahan sistem dan komitmen semua pihak.”

Saut Situmorang,
Wakil Ketua KPK.

tersebut, para pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah menyusun rencana aksi yang pelaksanaannya disupervisi oleh KPK.

Sebagai wujud evaluasi, pada

Senin (7/3/2016), KPK mengundang kedua institusi tersebut untuk menindaklanjuti rencana aksi sebelumnya. Hasil tindak lanjut dari Kajian Sistem JKN menunjukkan, Kemenkes telah melaksanakan 11 dari 13 rencana aksi (84,6 persen), sementara BPJS Kesehatan telah mengimplementasikan 20 dari 22 rencana aksi (90,9 persen). “Secara keseluruhan, rekomendasi KPK atas pencegahan korupsi di JKN telah diimplementasikan 88,5 persen. Kalau tidak berjalan, *impact*-nya akan lebih luas lagi,” ujar Saut.

KPK mengimbau, sejumlah rencana aksi yang belum dilakukan agar segera diimplementasikan. Seperti rencana aksi yang harus dilakukan Kemenkes dalam perbaikan regulasi tata kelola dana kapitasi yang belum disahkan. Juga hasil monitoring evaluasi perbaikan tata kelola dana kapitasi yang belum terpublikasi ke masyarakat luas. “Koordinasi BPJS dengan Kemenkes juga perlu ditingkatkan agar peraturan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Dirjen Kefarmasian dan Alat-alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang berterima kasih kepada KPK atas fokusnya dalam agenda sektor kesehatan, terutama dalam tata kelola layanan publik. Kemenkes, lanjut Maura, berupaya membuat regulasi yang lebih efektif untuk bisa menjalankan berbagai rekomendasi KPK. “Kami sangat berkepentingan untuk tata kelola ini berjalan dengan baik dan akan menjadi suatu dorongan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, serangkaian kajian sistem di sektor kesehatan



PAPARAN HASIL KAJIAN- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan sambutan dalam FGD Farmasi di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa (2/2 /2016).

INTEGRITO

telah dilakukan demi upaya perbaikan tata kelola yang lebih profesional dan antikorupsi. Di antaranya, Kajian Pengelolaan Dana Kapitasi dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemda. “Tindak lanjutnya, Kemenkes telah menjalankan tujuh dari 15 rencana aksi, sementara BPJS Kesehatan menjalankan 11 dari 13 rencana aksi,” kata Pahala. Ia menambahkan, kajian lain yang dilakukan KPK adalah Kajian Penyusunan Alat Diagnostik Pencegahan Kecurangan dalam Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Menurut Pahala, selain melakukan beragam kajian, untuk membenahi sektor kesehatan, KPK berinisiatif melakukan program pencegahan yang terintegrasi. Misalnya, KPK bersama

Kemenkes menggandeng sejumlah organisasi kesehatan dan perusahaan farmasi awal Februari 2016 guna membahas pengaturan *sponsorship* dari pihak farmasi kepada rumah sakit dan para dokter.

“Pertemuan serupa juga digelar KPK dengan sejumlah perusahaan farmasi di seluruh Indonesia. Pertemuan bertajuk “Pembangunan Integritas Praktik Bisnis di Dunia Kesehatan” itu digagas mengingat korupsi di sektor swasta juga turut melibatkan para penyelenggara negara,” kata Pahala.

Penindakan memang tidak juga membuat habis orang untuk korupsi, maka pencegahan juga akan terus dilakukan KPK. “Menyadarkan orang dulu sebelum berbuat,” ujar Saut Situmorang. (*)

GRATIFIKASI SEKTOR KESEHATAN

Menghilangkan Polemik *Sponsorship* Dokter

ming-iming fasilitas mewah bisa menggoyahkan iman siapapun. Tidak terkecuali para dokter yang sejatinya mengemban tugas sangat mulia. Di antaranya, melalui gratifikasi dengan memanfaatkan pola *sponsorship* seperti yang selama ini dikenal.

Oleh karena itu, KPK tak lantas tinggal diam. Pada 2016 ini, demi mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, KPK juga fokus memberantas perilaku koruptif di dunia kesehatan. Konkretnya, pada Selasa (2/2/2016), KPK mengundang sejumlah organisasi kesehatan dan perusahaan farmasi untuk berdiskusi.

Dalam kesempatan itu hadir sejumlah perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), per-

wakilan rumah sakit, Asosiasi Perusahaan Farmasi, serta perwakilan perusahaan farmasi nasional dan internasional.

Mereka berdiskusi tentang polemik yang kerap terjadi dalam profesi kedokteran. Salah satunya pemberian *sponsorship* kepada dokter. "Dalam dunia kesehatan banyak dikenal namanya *sponsorship* untuk profesi dokter. Ini akan menjadi masalah apabila dokter tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus mengatakan banyak dokter yang memberikan resep obat atas kongkalikong perusahaan farmasi. Mereka menyodorkan obat yang kurang tepat kepada si pasien. "Kadang-kadang dokter memberikan resep semauanya, dan memberikan obat atas rekomendasi perusahaan farmasi," katanya.

Delapan Poin Kesepakatan

Usai diskusi, para peserta kemudian menyepakati sejumlah

"Dalam dunia kesehatan banyak dikenal namanya *sponsorship* untuk profesi dokter. Ini akan menjadi masalah apabila dokter tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil,"

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

poin guna mencegah terjadinya praktik gratifikasi. Seperti disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, kesepakatan tersebut terkait dengan pemberian *sponsorship* kepada profesi kedokteran, yang pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. "Semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada



PELAYANAN RUMAH SAKIT-
Seorang tengah menangani pasien di RSUD Koja, Jakarta.

INTEGRITO

dokter, harus melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran,” kata Pahala pada kesempatan yang sama.

Adapun sejumlah poin kesepakatan tersebut, *pertama*, setiap profesi kedokteran memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan dalam mengikuti pengembangan pendidikan kedokteran berkelanjutan sesuai dengan keahlian bidang keilmuan. Oleh karena itu, pemberian *sponsorship* kepada profesi kedokteran pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. Semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter diharuskan melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran.

Kedua, pengelolaan dan penunjukan penerimaan *sponsorship* dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme pengaturan *sponsorship* yang terbuka dan akuntabel. *Ketiga*, Pemberian *sponsorship* tidak boleh mempengaruhi independensi dokter dan tidak dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat serta tidak diberikan kepada individu dokter.

Keempat, semua pihak mendorong dan terlibat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan pemenuhan tanggung jawab negara terhadap jaminan penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat yang dimulai dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran yang berkualitas dan terjangkau

Kelima, semua pihak mendorong tata kelola yang baik antara perusahaan obat dan alat



MEMBUBUHKAN KOMITMEN- Peserta FGD Farmasi menuliskan pesan sekaligus pernyataan mengenai komitmen praktik kesehatan yang bersih, Selasa (2/2/2016).

INTEGRITO

kesehatan dengan profesi kedokteran serta meninjau peraturan-peraturan yang ada agar sejalan dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi, terutama merevisi petunjuk teknis, SOP, dan kesepakatan bersama etika promosi obat yang melibatkan pihak-pihak yang hadir. *Keenam*, menempatkan ketentuan tentang pemberian *sponsorship* sebagai bagian penting dari proses reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan.

Ketujuh, pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan sesegera mungkin. Dan kemudian mengundang pihak-pihak yang belum terlibat dalam pembahasan ini untuk bersepakat dan menindak lanjuti kesepakatan ini.

Pahala mengatakan, pembe-

rian *sponsorship* kepada profesi kedokteran pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. Semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter, lanjut dia, diharuskan melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Bambang Supriatno, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyepakati delapan poin tersebut. Dia mengatakan, jika memang penerimaan *sponsorship* dari farmasi ke individu dokter langsung rentan terjadinya penerimaan gratifikasi, maka harus ada instansi yang berwenang mengatur pemberian *sponsorship* itu. “Instansi itu yang akan memutuskan apakah pemberian *sponsorship* itu boleh diterima si dokter atau tidak,” ujarnya. (*)

**PEGIAT
ANTIKORUPSI-**

Para peserta pelatihan penyuluh saat mengikuti kegiatan di Bantul, Yogyakarta, Jumat (25/11/2016).



INTEGRITO

MASTER CAMP 2016

Cetak Penyuluh, Pemberantasan Korupsi Menyeluruh

Tingginya tingkat korupsi di negeri ini menjadi tantangan besar sekaligus membutuhkan kerja keras untuk memberantasnya. Tak hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi seluruh elemen bangsa harus bersinergi. Langkah pemberantasan pun bukan saja bidang penindakan yang mampu memberi efek jera pelaku, tetapi juga bidang pencegahan untuk membangun kesadaran masyarakat.

Dalam bidang pencegahan, KPK meyakini bahwa pembangunan karakter dan budaya antikorupsi dapat lebih efektif untuk mencegah seseorang terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Salah satu program untuk membangun karakter dan budaya antikorupsi tersebut dilakukan melalui upaya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi. Atas dasar inilah, KPK melibatkan para penyuluh dari sejumlah instansi agar dampak positif terus meluas.

Untuk mewujudkan itu, KPK menyelenggarakan Pelatihan Penyuluh Antikorupsi berstandar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Jumat-Rabu (25-30/11/2016) di Desa Wisata Kebon Agung Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 62 peserta yang merupakan pegiat antikorupsi, aktivis komunitas dan widyaiswara dari kementerian/lembaga.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengemukakan, dengan melibatkan para penyuluh, cakupan area yang tersentuh dan menerima pembelajaran antikorupsi bisa lebih luas. “Sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan bahaya laten korupsi yang pada akhirnya dapat berkontribusi secara aktif dalam memberantas korupsi,” katanya dalam acara pembukaan di Gedung KPK, Kamis (24/11/2016).

Agus juga menyatakan, penyelenggaraan Pelatihan Penyuluh Antikorupsi diharapkan

“KPK mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat untuk menyampaikan pesan antikorupsi sehingga daya jangkaunya lebih luas.”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK

mampu memenuhi kebutuhan penyuluhan antikorupsi di seluruh Indonesia. Sejauh ini, lanjut Agus, sedikitnya ada 50 permintaan setiap pekannya yang masuk ke KPK. “Mustahil, personel KPK bisa memenuhi permintaan tersebut. Karenanya kami perlu mencetak penyuluh antikorupsi yang bersertifikat untuk menyampaikan pesan antikorupsi sehingga daya jangkaunya lebih luas,” katanya.

Pada kesempatan yang sama,

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengapresiasi KPK dalam merumuskan SKKNI bidang penyuluh antikorupsi yang akan menjadi acuan proses pendidikan dan pelatihan antikorupsi. “Semoga hal ini bisa dilakukan lebih masif yang pada akhirnya berdampak pada tersebarnya bibit integritas,” katanya se usai melakukan penandatanganan dokumen SKKNI bidang penyuluh antikorupsi.

Hanif juga mengatakan, ke depan, penyuluh antikorupsi dapat menjadi suatu profesi. “Anak-anak bangsa yang peduli dengan persoalan korupsi jadi punya masa depan yang baru dari segi profesi. Kenapa? Karena penyuluh antikorupsi dengan memiliki SKKNI bisa menjadi profesi,” katanya.

Hanif menegaskan, kehadiran para penyuluh antikorupsi dalam skala yang lebih luas dapat menjangkau semua sektor dan daerah. Hal itu bisa mempercepat upaya pemerintah untuk membangun sebuah sistem yang bebas dari korupsi. “Tentu, sebelum para penyuluh antikorupsi ini diterjunkan, mereka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada SKKNI,” ujarnya seraya menambahkan, dengan SKKNI akan meningkatkan integritas masyarakat di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, sehingga dapat pula meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Untuk mencetak tenaga penyuluh andal dan bersertifikat, dalam Pelatihan Penyuluh Antikorupsi para calon penyuluh antikorupsi ditempa berbagai pengalaman dan pembekalan agar mampu secara mandiri membuat materi penyuluhan, maupun model pembelajaran antikorupsi yang efektif dan menyenangkan yang akan digunakan dalam implementasi pendidikan antikorupsi.

Sejumlah kompetensi dan materi yang diberikan di antara-



GAGASAN - Peserta penyuluh dari kelompok dosen mempresentasikan mengenai upaya membangun integritas di sektor akademis pada Pelatihan Penyuluh Antikorupsi, Jumat (25/11/2016).

INTEGRITO

nya mengaktualisasikan nilai-nilai integritas; menangani konflik yang muncul dalam proses penyuluhan antikorupsi; menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi; menyadarkan bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme; membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi; serta melatih keterampilan antikorupsi sekaligus membangun sikap antikorupsi kelompok sasaran.

Penyuluh Bersertifikat

Kebutuhan akan tenaga penyuluh antikorupsi memang tak bisa ditawar lagi. Sebagaimana dikemukakan Deputy Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, selama ini KPK terkendala dalam memberikan penyuluhan antikorupsi karena terbatasnya personel.

“Padahal, undangan untuk memberikan penyuluhan antikorupsi dari berbagai lembaga kepada KPK cukup banyak. Jadi, dengan SKKNI ini siapa pun yang memegang sertifikat berhak melakukan penyuluhan antikorupsi,” ujar Pahala di Gedung KPK, Kamis (24/11/2016).

Pahala menyatakan, saat ini setidaknya ada 600 lembaga yang membutuhkan penyuluh anti-

korupsi bersertifikat. Setiap lembaga membutuhkan dua orang penyuluh bersertifikat. “Jadi kami ingin ada sekitar 1.200 orang yang disertifikasi untuk penyuluhan anti-korupsi. Kami ingin semua aparat pengawas di setiap lembaga memiliki kemampuan penyuluhan anti-korupsi. Rasanya lebih strategis seperti itu,” paparnya.

Untuk menasar target lebih luas, Pahala menyatakan, selain di lembaga pemerintah diperlukan juga penyuluh anti-korupsi bersertifikat di sektor swasta. Maklum saja, karena KPK saat ini tengah gencar melakukan pencegahan korupsi di sektor tersebut. Dengan adanya penyuluh di sektor swasta, lanjut Pahala, tentu ke depan akan ada orang yang memandu operasionalnya sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi.

Ke depan, menurut Pahala, KPK akan terus melakukan pelatihan anti-korupsi dengan SKKNI. “KPK menargetkan dalam dua tahun penyuluh antikorupsi bersertifikat tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun ini, ditargetkan ada 62 penyuluh anti-korupsi dari berbagai lini yang memiliki sertifikat SKKNI,” jelasnya. (*)

KERJA SAMA KPK

Perluas Sinergi Berantas Korupsi

Menjadi garda terdepan, bukan berarti KPK bisa sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, di saat korupsi kian masif, berjamaah, dan bahkan sudah menembus batas teritorial negara.

Itulah sebabnya, sama seperti tahun sebelumnya, pada 2016 ini KPK tetap gencar melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Baik dengan lembaga/ke-
menterian, hingga perguruan tinggi.

Pada bulan ketiga setelah pergantian pimpinan, misalnya, KPK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) di Gedung OJK pada Kamis (10/3/2016).

Perjanjian kerja sama itu, ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua OJK Mulia-
man D. Hadad. Dalam MoU, ke-

dua belah pihak menyepakati beberapa hal. Antara lain tentang pertukaran data dan informasi, kegiatan pencegahan dan edukasi, serta penelitian dan pengembangan. “Pengalaman saat krisis itu berawal di sektor keuangan. Jadi kalau tidak berhati-hati dalam membuat standar sistem yang lebih baik, itu risiko kita bisa terkena krisis lagi,” kata Agus.

Agus mengimbau pihak swasta yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan lain-lain agar mematuhi kewenangan OJK yang dapat mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik.

OJK menyambut baik kerja sama tersebut. Menurut Mulia-
man, industri keuangan memang memiliki cakupan yang relatif luas, sehingga sudah seharusnya memerlukan upaya besar. Mulia-
man mengatakan, meski selama

“Banyak teori dan pengalaman serta kisah sukses pemberantasan korupsi dilakukan melalui kerja sama. Sehingga secara masif kita bisa saling bersinergi untuk mewujudkan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.



ILUSTRASI-
KERJA SAMA.

BLOGSPOT.COM

ini berbagai kegiatan pencegahan korupsi telah cukup banyak dilakukan kedua belah pihak, namun dengan adanya kerja sama tersebut akan membuka kerja sama lain yang lebih luas antara kedua belah pihak.

“Ini memerlukan upaya besar, karena selain industri keuangan luas, edukasi dan program pencegahan juga memerlukan waktu banyak. Kami akan merancang sosialisasi kepada industri agar kemudian industri memahami seluruh-beluk tindak pidana korupsi,” ujar Mulyaman.

Tak hanya dengan OJK, pada Rabu (14/9/2016), KPK kembali memperluas kerja sama. Kali ini, MoU dilakukan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Kerja sama tersebut dirasa penting, mengingat dana yang dikelola BPJS TK terbilang besar, yakni mencapai Rp240 triliun per Agustus 2016. Bahkan, menurut Agus Rahardjo, titik yang patut diwaspadai pada instansi tersebut adalah rawannya kebocoran di bidang pengurusan investasi.

Dalam kesempatan itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menegaskan, pihaknya akan terus menerapkan komitmen pencegahan korupsi, baik kepada kalangan internal maupun kepada para mitra. “Kami memerintahkan kepada seluruh jajaran direksi hingga kepala divisi dan lain-lain untuk menandatangani pakta integritas. Ini sifatnya wajib. Bila tidak bersedia, saya akan minta mundur. Bila mitra kami tidak bersedia, maka saya perintahkan kepada direktur operasional untuk tidak menerima tawaran kerja sama atau membatalkan kerja sama yang berjalan,” tegas dia.



SINERGI- Ketua KPK Agus Rahardjo menyaksikan penandatanganan kerja sama pencegahan korupsi dengan tujuh perguruan tinggi Rabu, (15/6/2016).

INTEGRITO

Menggendong Pihak Kampus

Tidak hanya dengan kementerian/lembaga atau instansi lain, KPK juga menggandeng kalangan akademisi untuk berkolaborasi. Wujud dari upaya pencegahan korupsi tersebut yakni dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi. Yakni Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor. Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Gedung KPK pada Rabu (15/6/2016), menyangkut pemanfaatan informasi dan publikasi.

Kerja sama bertujuan, agar kedua pihak dapat saling memanfaatkan publikasi lokal yang diterbitkan masing-masing lembaga. Melalui upaya tersebut, diharapkan bisa mendukung pemberantasan pidana korupsi secara efektif dan efisien, sesuai kewenangan dan kapasitas perguruan tinggi. Publikasi lokal meliputi skripsi, tesis, disertasi, hasil ka-

jian/penelitian, buku/literatur dan dokumen lain. Berbagai materi publikasi tersebut, kemudian bisa diakses melalui <http://acch.kpk.go.id>.

Perjanjian kerja sama ditandatangani antara Ketua KPK Agus Rahardjo dan para pimpinan perguruan tinggi tersebut. KPK memandang, perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mencetak calon-calon pemimpin bangsa ini.

Dengan penambahan kerja sama, sampai saat ini KPK telah menjalin kolaborasi dengan 21 universitas. Dari kerja sama dengan 14 perguruan tinggi terdahulu, KPK sudah mengumpulkan 971 materi publikasi lokal subjek korupsi dan bidang terkait. “Banyak teori dan pengalaman serta kisah sukses pemberantasan korupsi dilakukan melalui kerja sama. Sehingga secara masif kita bisa saling bersinergi untuk mewujudkan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” katanya. (*)

KESENIAN- Salah satu pertunjukan kesenian dalam perayaan malam puncak Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) di Riau Kamis (9/12/2016).



INTEGRITO

HARI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL

Menggugah Kesadaran, Menegakkan Integritas

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 31 Oktober 2003 menjadi tonggak sejarah pemberantasan korupsi. Melalui resolusi Nomor 58/4, Majelis Umum PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional (HAKI). Sejak itu pula, Indonesia secara rutin selalu memperingati hari tersebut hingga sekarang.

Begitu pula pada 2016 ini, peringatan HAKI ke-11 digelar di Provinsi Riau. Agenda bertajuk “Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Indonesia Tangguh” yang dipusatkan di Kompleks Kediaman Gubernur Riau/Gedung Daerah, Pekanbaru, ini dilaksanakan mulai Rabu-Minggu (7-11/12/2016).

Dipilihnya Provinsi Riau sebagai tuan rumah agenda tahunan tersebut salah satunya karena Pemerintah Provinsi Riau memiliki komitmen untuk bertransformasi menjadi provinsi yang unggul dalam pembangunan budaya integ-

ritas. Pemprov Riau juga bertekad menjadi yang terdepan dalam setiap upaya pencegahan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai profesional, religius dan integritas.

“Provinsi Riau juga tengah berbenah melalui pendampingan yang dilakukan KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan dan Penindakan. Sehingga diharapkan, Riau bisa jauh lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pembukaan HAKI di Riau, Kamis (08/12).

Agus mengatakan, peringatan HAKI melalui Kegiatan Festival Antikorupsi 2016, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mendorong gerakan antikorupsi. Selain itu, lanjutnya, HAKI menjadi momentum strategis untuk menggalang kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. “Masyarakat juga berperan sebagai aktor,

“HAKI menjadi momentum strategis guna menggalang kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat juga berperan sebagai aktor, bukan lagi menjadi objek dalam pemberantasan korupsi.”

Agus Rahardjo,
Ketua KPK.

bukan lagi menjadi objek dalam pemberantasan korupsi,” ujar Agus.

Keterlibatan masyarakat juga tertuang dalam logo Nasional Peringatan Hari Antikorupsi 2016 yakni berupa gerakan putaran angin dari bawah yang semula kecil kemudian semakin besar dan kuat. Hal itu dianalogikan sebagai simbol gerakan masyarakat yang kuat dan berkelanjutan untuk menyuap korupsi.

Dengan *tagline* “Ayo Bergerak Riau! Untuk Indonesia Tangguh” KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar memberdayakan setiap potensi yang dimiliki dalam upaya pencegahan korupsi, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dalam segala aspek pembangunan. “Jadi tidak hanya keterlibatan sesama instansi pemerintah, melainkan juga swasta dan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara berkelanjutan,” kata Agus.

Deklarasi Antikorupsi

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan HAKI tahun ini juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya, menggelar sebuah forum yang bertujuan membuat kesepakatan nasional terkait pembangunan budaya integritas nasional, yakni Rembuk Integritas Nasional. Kegiatan yang diikuti oleh 120 kementerian, lembaga, organisasi dan pemerintah daerah (KLOP) tersebut digelar pada Kamis (8/12/2016).

Untuk mengakomodasi instansi, ada pula Integrity Expo yang dilaksanakan Kamis-Sabtu (8-10/12/2016). Dalam agenda itu,



PEMBUKAAN HAKI- Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menggunting pita sebagai tanda dibukanya Peringatan HAKI Kamis (8/12/2016).

INTEGRITO

mereka diberikan kesempatan untuk menampilkan program pembangunan budaya integritas dan layanan unggulan masing-masing kepada masyarakat umum.

Dalam agenda yang sama KPK juga menggelar Festival Budaya Nusantara, Atraksi Budaya yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum Jumat (9/12/2016). Acara yang digelar dengan konsep panggung terbuka tersebut berlangsung meriah. Aksi panggung band-band lokal turut memeriahkan malam itu dengan menyanyikan lagu-lagu bernuansa moral yang dipopulerkan musisi legendaris nasional. “Apa yang kita saksikan, inilah yang kami sebut orkestra pemberantasan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Saut pun memfilosofikan bermusik sebagai bentuk pencegahan korupsi. Ia mengatakan, musik tidak akan terdengar indah jika para pemainnya tidak saling bekerja sama. “Begitu pula pemberantasan korupsi. Kalau tidak

bekerja sama tidak akan berhasil,” ujarnya.

Dalam puncak peringatan HAKI 2016 digelar pula kegiatan tradisional melayu batagak tunggul atau menegakkan tonggak. Menegak tunggul merupakan tradisi orang melayu yang dilakukan secara musyawarah dan muafakat sebagai simbol penyelesaian masalah secara bersama. Aksi tersebut dilakukan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Al Azhar, Koordinator FITRA Riau Usman dan tokoh agama.

Dalam agenda yang sama KPK juga memberikan apresiasi atas capaian atau prestasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan budaya integritas di Indonesia melalui Gratifikasi dan LHKPN Award. Dipenghujung acara, seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan bersama-sama membacakan deklarasi antikorupsi yang disebut proklamasi rakyat Indonesia antikorupsi. (*)

Pengawasan Berbasis Partisipasi Publik



Korupsi merupakan tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan. Hingga kini, walau sistem pengawasan sudah sedemikian berlapis, ditengarai kebocoran korupsi masih tinggi. Hal ini disebabkan konsep pengawasan masih menggunakan sistem pengawasan formal bukan faktual. Dampak dari korupsi selain dana yang menjadi pembangunan nyata makin rendah, memunculkan apatisme rakyat yang pada gilirannya menurunkan misi pembangunan itu sendiri.

Hasil Pembangunan di Indonesia dianggap masih rendah sehingga dalam indikator pembangunan bangsa tampak sekali keteringgalan bangsa Indonesia. Keadaan ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat terutama pada kelas menengah yang tereduksi akan hak dan kewajibannya.

Pada masa lalu, sistem pilkada ditentukan oleh rakyat, maka rakyat tidak punya kekuatan apa pun selain mengikuti keadaan tanpa daya sama sekali. Ketidakpuasan rakyat tidak berpengaruh pada jabatan strategis negara. Sebaliknya sekarang dimasa demokrasi ini, kekuatan rakyat makin kuat dalam menentukan pemimpinnya, menyuarakan keinginan-

nya, serta ditambah dengan sistem media massa yang demokratis maka penghentian korupsi makin menjadi kesadaran berbangsa.

Dalam dekade terakhir ini, konsep pembangunan berubah cepat dari konsep sentralisasi menjadi konsep desentralisasi. Pada awal kegiatan konsep ini menimbulkan dampak yang tidak baik. Korupsi berpindah dari sentral menuju daerah berdampak banyak walikota dan bupati serta anggota DPRD masuk penjara karena korupsi. Keadaan ini memunculkan keraguan yang kuat untuk meneruskan titik alur pembangunan dari pusat menjadi dari pinggir. Bahkan pembangunan berbasis desa, ditakutkan akan membuat banyak kepala desa menjadi penghuni utama penjara. Meskipun begitu, pemerintah saat ini tetap kuat meneruskan pembangunan berbasis desa. Kesadaran masyarakat yang makin tinggi akan hak hingga sampai di desa meningkatkan tuntutan bagaimana membentuk sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan konsep pengawasan ini, maka diharapkan pembangunan akan lebih banyak terlaksana dan memberi kesejahteraan masyarakat yang luas.

Konsep pengawasan mempunyai banyak model dan salah satu model pengawasan ber-



IST

Oleh: **DR. Dr. H. Budi Laksono, MHS**
Relawan Jamban untuk Semua Keluarga (WC4ALL Family)-
Yayasan Wahana Bakti Sejahtera - DMTK.

basis formal dengan organ pengawas yang mengakar ke atas yang rentan mengalami pembelokan. Sejarah pengawasan dimana-pun menunjukkan bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna kegiatan adalah paling efektif.

Berdasar dari hal di atas, maka dalam pengawasan dana pembangunan di masyarakat, kami mengusulkan konsep pengawasan berbasis masyarakat sebagai pengawas dan pelaku kegiatan yang disebut *Community Base Participation and Donate Supervision* (Cobapados).

Cobapados adalah metode pengawasan dana pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi bagaimana penggunaan dan pengawasannya. Konsep ini sebenarnya tidak baru bahkan dalam kegiatan sehari-hari di masjid, mushola, penggunaan dana arisan / iuran warga kampung telah dilakukan pengumpulan dan penggunaan secara musyawarah dan pelaporan transparan.

Cobapados dibuat konsepnya pada saat penulis menjadi pemegang amanah bantuan masyarakat Kota Semarang untuk masyarakat Aceh yang mengalami bencana tsunami. Terdapat beberapa hal penting soal penyaluran dana bencana di Aceh. Pertama, penulis adalah orang Jawa, pegawai negeri walau konteks ke sana adalah melawan PMI. Dua keadaan yang secara umum tidak disukai oleh orang Aceh yang merasa dilanggar haknya oleh pendatang atau pejabat yang sering dikonotasikan dengan Jawa. Kedua, bau korupsi sudah sangat membuat rakyat Aceh muak dan mungkin juga menjadi salah satu alasan ingin memerdekakan diri. Ketiga, dalam suasana darurat bencana, korupsi makin merajalela karena pengawasan minim. Keempat, rakyat aceh adalah rakyat yang berani, serta adanya kelompok bersenjata dan keadaan saat itu tidak sulit melakukan kejahatan bahkan pembunuhan untuk mendapat-

kan harta-benda. Sehingga bila ada korupsi atas hak mereka, pasti mereka akan menghukum dengan caranya.

Berdasarkan keadaan yang sensitif tersebut, maka penulis dalam diskusi dengan masyarakat di Desa Leupung saat ini menyatakan dengan tegas, lugas, bahwa penulis membawa uang dari masyarakat Semarang lewat PMI sebanyak Rp153 juta yang ada di buku tabungan. Uang yang ada adalah hak bagi masyarakat desa di Aceh yang menerima konsep pembangunan kami yaitu pembangunan rumah AB6, Meunasah, penghijauan infrastruktur desa lain yang diperlukan berdasar musyawarah. Kemudian dengan jelas penulis sebut, tidak ada hak penulis satu rupiah pun atas uang tersebut untuk penulis.

Setelah masyarakat menerima konsep bantuan tersebut, maka bersama masyarakat merencanakan penggunaannya dan dengan Pak Kecik, mengambil uang untuk belanja yang diperlukan masyarakat membangun rumah AB6 dan Meunasah serta keperluan lain yang diperlukan masyarakat. Semua masyarakat tahu, dana itu untuk apa dan berapa dikeluarkan hingga akhir kegiatan dengan habisnya dana tersebut.

Manfaat dari konsep Cobapados bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dimana mereka gotong royong tanpa menerima pembayaran apapun dengan semangat. Semua dana terpakai untuk membangun apa yang direncanakan masyarakat. Bila diperlukan swadaya, maka otomatis akan direspons dengan senang hati. Kerja sama dan silaturahmi indah pengelola dengan masyarakat terbina dengan sangat baik dan memberi kebanggaan tersendiri.

Jadi, apabila dana pembangunan masyarakat diaudit berdasarkan Cobapados, maka luaran pembangunan akan optimal dan meredakan beban auditor negara. (*)

e-LHKPN MELAPOR HARTA MAKIN MUDAH



Pertanyaan:

Salam antikorupsi!

Pengalaman saya dalam melaporkan harta kekayaan secara manual sangat menyita waktu dan membutuhkan dokumen yang tidak sedikit. Prosedur manual tersebut bisa jadi membuat keengganan para pegawai negeri atau pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan aplikasi berbasis online untuk pelaporan harta kekayaan melalui e-lhkpn atau pelaporan LHKPN secara elektronik. Bagaimana profil dan gambaran dari e-lhkpn tersebut? Saya yakin pertanyaan ini mewakili banyak kalangan yang membutuhkan informasi e-lhkpn secara komprehensif.

Denis Sugiarto - Jakarta Selatan

Jawaban:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Denis Sugiarto atas perhatian dan ketaatannya dalam melaporkan harta kekayaannya. Betul memang pada Oktober 2016 lalu, KPK meluncurkan layanan pelaporan LHKPN berbasis elektronik dengan alamat *e-lhkpn*. Terkait pertanyaan Saudara, dapat kami jelaskan bahwa e-lhkpn merupakan sistem laporan harta kekayaan secara elektronik yang

dilakukan oleh Penyelenggara Negara (PN) kepada KPK.

Dengan model pelaporan elektronik ini tentu diharapkan pola pelaporan manual yang menurut Anda sangat menyita waktu bisa dihilangkan dan pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan tentu saja bermanfaat. Kemudahan dan kepraktisan ini bisa terwujud karena melibatkan secara langsung PN, Unit Pengelola LHKPN pada Instansi/Lembaga, dan juga KPK. Yang lebih penting lagi, e-lhkpn diharapkan mampu mendorong peran serta masyarakat untuk memberikan masukan atas laporan harta kekayaan PN yang sudah diumumkan.

Namun terkait manfaat e-lhkpn secara utuh, yakni layanan ini menjadi instrumen pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengangkat atau mempromosikan PN berdasarkan kepatuhan LHKPN-nya. Ap-

likasi e-lhkpn juga menjadi instrumen untuk mengawasi kekayaan PN sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas bagi PN dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan hartanya.

E-lhkpn dengan tagline “transparansi itu mudah” memang dirancang selain untuk memberikan kemudahan kepada PN, juga agar tercipta sistem transparansi dan pelaporan harta PN menjadi terang benderang. Hal ini bisa terwujud karena dalam e-lhkpn ada empat *user*. *Pertama* adalah Admin KPK, yakni pegawai yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola aplikasi e-lhkpn, membuat akun admin instansi, hingga melakukan *monitoring* pembuatan/pemutakhiran WL/PN.

Kedua, Admin Instansi: Pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, dan melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran WL/PN. *Ketiga*, Admin Unit Kerja. Yaitu pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan unit kerja, membuat akun PN/WL, dan membuat/pemutakhiran daftar PN/WL. *Keempat*, *user* e-lhkpn adalah PN/WL yang melakukan pengisian laporan harta kekayaan online melalui aplikasi e-lhkpn.

Dapat kami jelaskan pula, aplikasi e-lhkpn juga memiliki tiga modul yang bisa mempermudah para PN/WL untuk melaporkan hartanya. Modul pertama adalah *e-registration*. Modul ini digunakan oleh Unit Pengelola LHKPN (UPL) pada instansi/lembaga untuk mendaftarkan wajib LHKPN (WL); digunakan KPK melakukan monitoring WL yang didaftarkan oleh UPL; dan digunakan oleh UPL dan KPK untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN.

Modul kedua, *e-filing*. Modul ini digunakan oleh PN atau WL untuk melaporkan harta secara online serta digunakan oleh PN/WL untuk mengetahui status dan riwayat laporan hartanya. Dan modul ketiga, *e-announcement*.

Modul ketiga ini digunakan oleh KPK untuk mengumumkan laporan harta PN/WL yang telah diverifikasi secara administrasi. Tak hanya KPK, publik juga berhak mengakses pengumuman LHKPN dan memberikan masukan kepada KPK terhadap pengumuman LHKPN tersebut.

Dari ketiga modul tersebut, memiliki periode dan siklus yang telah ditentukan dalam satu tahun. Untuk siklus *e-Registration*, misalnya, *update* daftar wajib LHKPN oleh KLOP dan monitoring update wajib LHKPN oleh KPK pada rentang waktu November hingga Desember. *e-filing*, yakni terkait pengisian laporan harta oleh Wajib LHKPN/PN, dilakukan dalam jangka waktu 1 Januari hingga 31 Maret untuk pelaporan periodik dan Januari hingga Desember untuk pelaporan khusus. Sementara untuk *e-announcement*, verifikasi administrasi dan pengumuman laporan harta oleh KPK dilakukan pada bulan April hingga Oktober.

Demikian informasi dan penjelasan mengenai e-lhkpn yang dapat kami jelaskan, semoga memberikan pencerahan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selamat mencoba! (*)



www.elhkpn.kpk.go.id



elhkpn@kpk.go.id (penerimaan formulir Excel)



informasi.lhkpn@kpk.go.id (pertanyaan, pengaduan, lainnya)



(021) 2557 8396



Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta 12950

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan melalui surel: Informasi.LHKPN@kpk.go.id



PAKAN TERNAK- Masyarakat Suku Samin memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan makanan ternak.

SUARAMERDEKA

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SAMIN KUATNYA SIKEP MENJAGA ALAM

HINGGA ERA DIGITAL, MASYARAKAT SAMIN TETAP KONSISTEN MEMPERTAHANKAN TRADISI. TEGUH MEMELIHARA KEBERSAMAAN DAN KEJUJURAN, KUAT MENJAGA KELESTARIAN ALAM.

Dengan kekayaannya yang begitu melimpah, alam menjadi salah satu sumber penghidupan bagi manusia. Namun sayang, meski telah banyak dimanfaatkan, alam kerap salah menerima balasan. Kelestariannya sering kali diabaikan oleh segelintir orang yang memanfaatkan alam secara ser-

ampangan.

Lain halnya dengan pandangan masyarakat Samin. Bagi mereka, alam diibaratkan sosok ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pandangan hidup tersebut terus diyakini dan dijaga secara turun temurun hingga kini.

Sejarah orang-orang Samin memang tidak terlepas dari tokoh kunci dalam penyebaran ajaran Saminisme, yakni Raden Kohar, tokoh politik dan intelektual yang hidup pada masa penjajahan Belanda di abad ke-18. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, ia kemudian berganti nama menjadi Samin Surosentiko. Nama itulah yang kemu-

dian menjadi sebutan bagi ajaran dan pengikutnya.

Sejak Raden Kohar alias Samin Surosentiko menyebarkan ajaran Saminisme di sekitar hutan Randublatung, Blora pada abad ke-18, wong Samin memang mengedepankan kebersamaan dan kejujuran, termasuk pada saat menjaga alam. Berpedoman falsafah *banyu podo ngombe, lemah podo duwe, godong podo gawe*, mereka teguh mempertahankan sikap itu hingga era digital sekarang. Falsafah itu sendiri memiliki arti, “air sama-sama diminum, tanah sama-sama dimiliki, daun sama-sama dimanfaatkan”.

Hingga saat ini, wong Samin masih kuat mempertahankan sikap mereka. Kuatnya karakter juga diperlihatkan wong Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Dalam upaya menjaga pelestarian kayu jati di daerah setempat, misalnya, mereka hanya memanfaatkan daun jati untuk keperluan sehari-hari dan rantingnya untuk keperluan masak-memasak. Mereka tidak mau merusak hutan.

Saminiisme mengajarkan tentang kesederhanaan, kejujuran, dan hidup selaras dengan alam. Bagi wong Samin, tanah ibarat ibu sendiri karena tanah memberi kehidupan kepada mereka. Itulah sebabnya, mereka senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan alam. Sebagai petani tradisional, misalnya, mereka mengolah lahan dengan berpedoman pada musim, yakni musim penghujan dan kemarau. Dengan berpedoman pada musim, mereka bisa melakukan pengolahan tanah secara optimal.

Prinsip mereka yang kuat terkait kebersamaan dan kejujuran, sebenarnya sudah tercermin dari arti nama Samin itu sendiri. Mereka kerap memaknai, bahwa “samin” adalah “sami-sami amin” alias senasib sepenanggungan. Konkretnya, dalam keadaan apapun, mereka adalah seperjuangan, termasuk bersama-sama menjaga alam.

Kebersamaan dan kejujuran wong Samin, juga tercermin dari eksistensi yang sudah turun-temurun diperoleh dari pendahulunya, yaitu *ono niro mergo ningsun, ono ningsun mergo niro*. Artinya, saya ada karena kamu dan kamu ada karena saya. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa wong Samin memang memiliki kejujuran yang tinggi dan solidaritas yang kuat, serta sangat menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial.



HARMONIS- Kehidupan masyarakat Samin sangat mengedepankan relasi dengan alam.

Dalam kaitan itulah Orang Samin juga tidak mau menyakiti sesama. Dan yang terpenting, mereka sangat pantang melakukan *petil jumput*, yakni mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Mereka tidak mau mencuri dan tidak mau haknya dicuri. Itulah sebabnya, mereka juga sangat berhati-hati dengan berbagai program pinjaman, karena khawatir tak sanggup mengangsur. Salah satu contoh, ketika Pemerintah Orde Baru menggalakkan program swasembada beras melalui pembinaan dan pemberian kredit kepada para petani melalui Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas), mereka memilih tidak ikut program tersebut. Alasannya, karena mereka khawatir tidak sanggup membayar dan takut mengemplang kredit tersebut.

Ajaran Samin yang mengedepankan kejujuran, kasih sayang, dan pantang merusak alam itu, akhirnya mendapat simpati luas. Puncaknya, di tengah permukiman warga Samin, sekarang dibangun Pendopo Sedulur Sikep hasil sumbangan pemerintah dan berbagai pihak termasuk asing.

Atas keunikan itu pula, Pemkab Blora menjadikan Samin sebagai ikon kota. Terbukti, Bupati Blora mewajibkan para pegawai negeri sipil (PNS) setiap Kamis dan setiap akhir bulan mengenakan pakaian kebesaran Wong Samin. Serba hitam. Mulai ikat kepala, baju hitam lengan panjang tanpa kerah, serta celana hitam di atas mata kaki. Tak hanya itu, kawasan permukiman Sedulur Sikep Samin di Dusun Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora, kini telah dijadikan sebagai desa wisata. (*)

ATURAN MENIKMATI FASILITAS REKANAN

Pertanyaan:

Saya seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di Kalimantan. Beberapa waktu lalu, saya mengikuti pelatihan di Jakarta terkait profesi saya. Hanya saja, seluruh biaya yang dikeluarkan, dibiayai oleh perusahaan farmasi yang menjadi rekanan rumah sakit tempat saya bekerja tersebut: seperti biaya akomodasi, biaya pelatihan, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah semua biaya yang saya terima terkait keikutsertaan saya tersebut diperbolehkan atau itu termasuk gratifikasi?

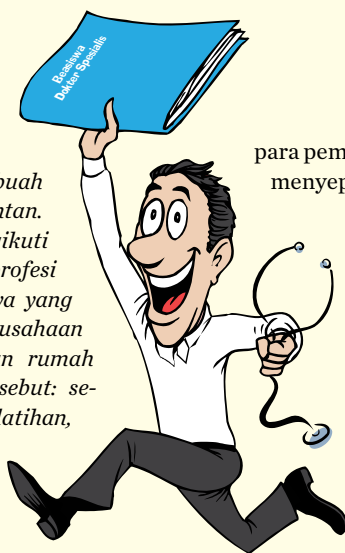
Pertanyaan kedua, apakah boleh saya menerima fasilitas berupa pendidikan lanjut (spesialis dan sejenisnya) yang dibiayai oleh perusahaan farmasi, bukan rumah sakit tempat saya bekerja? Hal ini mengingat dibutuhkan peningkatan kapasitas diri pada profesi saya sementara jika mengandalkan dari rumah sakit tentu saja anggarannya terbatas.

Demikian dua pertanyaan yang saya ajukan, terima kasih atas kesempatan dan jawab pengasuh.

dr. Haris, Kalimantan

Jawab:

Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Saudara untuk berdiskusi terkait gratifikasi di ruang konsultasi ini. Terkait pertanyaan yang Saudara sampaikan, dapat kami sampaikan bahwa pada "Pernyataan Bersama Mencegah Gratifikasi pada Profesi Kedokteran" yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2016,



para pemangku kepentingan terkait telah menyepakati beberapa hal.

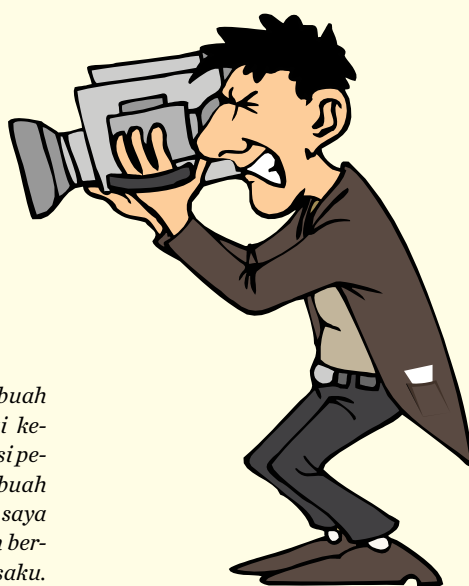
Di antaranya bahwa setiap profesi kedokteran memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan dalam mengikuti pengembangan pendidikan kedokteran berkelanjutan sesuai dengan keahlian bidang keilmuan. Oleh karena itu, pemberian *sponsorship* kepada profesi kedokteran pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. Semua

tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter diharuskan ditujukan kepada institusi atau organisasi profesi kedokteran. Penunjukan penerima *sponsorship* dilakukan oleh institusi tempat dokter bekerja atau organisasi profesi kedokteran.

Selain itu, tentu saja pengelolaan dan penunjukan penerima *sponsorship* harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengaturan *sponsorship* yang terbuka dan akuntabel. Pemberian *sponsorship* tidak boleh mempengaruhi independensi dokter dan tidak dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat serta tidak diberikan secara langsung kepada individu dokter.

Dengan demikian, diharapkan seorang dokter akan tetap terjaga independensinya dalam memberikan pelayanan pasien. Ia tidak terikat dengan rekanan baik industri farmasi atau yang lainnya sehingga ia akan memberikan yang terbaik bagi para pasien yang dilayannya. (*)

FASILITAS BAGI JURU WARTA



Pertanyaan:

Saya bekerja sebagai wartawan di sebuah media massa di Jakarta. Dalam berbagai kesempatan, saya kerap diundang oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengikuti sebuah acara/kegiatan untuk diliput. Tentu saja saya mendapatkan berbagai kemudahan dengan berbagai fasilitas; akomodasi sampai uang saku. Namun, hal ini tidak mempengaruhi independensi dalam penulisan berita tersebut. Apakah hal ini termasuk gratifikasi yang dilarang? Bolehkah saya menerima hal tersebut?

Melati, Jakarta

Jawab:

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesediaannya untuk mendiskusikan pertanyaan mengenai gratifikasi terkait profesi yang Saudari jalani selama ini. Dalam konteks persoalan yang Saudari hadapi, pertama-tama tentu yang perlu dilihat adalah apakah Saudari termasuk subyek hukum peraturan mengenai gratifikasi, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dan 12C UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Ketentuan mengenai gratifikasi tersebut jelas berlaku untuk (subyek hukum) Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Meski demikian, Saudari juga perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta kode etik profesi (dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik). Peraturan internal perusahaan yang berlaku juga harus diperhatikan, apalagi semua institusi media massa secara umum memberlakukan peraturan melarang wartawannya menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat menjalankan tugas peliputan.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat. (*)

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan melalui surel : integrito@kpk.go.id

DIALOG KEBANGSAAN FAKULTAS HUKUM UI

Mencari Solusi, Perangi Korupsi

Berangkat dari keprihatinan akan fenomena korupsi di negeri ini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar dialog kebangsaan bertajuk “Peran Indonesia dalam Langkah Perangi Korupsi.” Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (25/11/2016), itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said, dan mantan Wakil Ketua KPK Chandra Muhammad Hamzah.

Dalam acara tersebut, para narasumber memberikan pandangan terkait isu korupsi yang kerap terjadi di Tanah Air. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, fenomena korupsi di Indonesia memang tergolong akut. Yang lebih memprihatinkan, kata dia, praktik tersebut bahkan mulai masuk ranah keagamaan dan sosial. “Zakat dikorupsi, haji dikorupsi. Di Ternate, masjid dikorupsi. Bahkan

Al-Quran dikorupsi,” kata Syarief.

Melihat fenomena korupsi yang kian masif, tak ada jalan lain, kecuali pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Mulai dari penindakan hingga upaya pencegahan, termasuk dengan keterlibatan pihak kampus sebagai lembaga pendidikan. Bahkan Syarief mengatakan, salah satu pelajaran antikorupsi yang dia dapat pun, salah satunya melalui kampus.

Sementara, narasumber lain dalam dialog tersebut, yakni mantan Wakil Ketua KPK Chandra Muhammad Hamzah juga menanggapi fenomena serupa. Menurutnya, dalam menentukan hukuman bagi koruptor, Indonesia seharusnya mempunyai perbedaan dalam beberapa konteks.

Menurut Chandra, hukuman terhadap koruptor tidak bisa disamaratakan dan harus melihat beberapa pertimbangan. Misalnya, kata dia, jika pegawai negeri menerima suap dan

Prihatin terhadap korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar dialog kebangsaan tentang fenomena korupsi. Perlu upaya luar biasa untuk memberantas korupsi yang semakin masif.

mendapat hukuman 20 tahun penjara. “Hukuman itu harus dibedakan dengan sanksi hakim. Harus lebih berat. Hakim tahu hukum, tapi masih melanggar. Hukumannya harus double,” ujarnya. (*)



ILUSTRASI- Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kerap menjadi topik pembicaraan khusus dalam berbagai kegiatan.

WORDPRESS.COM

TEATER “MENJARING MALAIKAT”

Ketika Jibril “Main-main”

Meski masih menyangsikan keberadaan Jibril yang hadir dalam mimpinya, Guna, tukang kebun Sekolah Dasar bersikukuh membuat jaring untuk menangkap malaikat tersebut. “Jibril pasti akan masuk perangkap dan tak bisa lepas!” ujarnya.

Sikap pantang menyerahnya itu akhirnya berbuah manis. Jibril pun kemudian hadir. Sang tukang kebun itu lantas memohon bantuannya untuk membereskan carut-marut masalah negeri, salah satunya adalah korupsi. Namun sayang, sosok malaikat Jibril yang hadir, tak sedang ingin melakukan hal serius. Ia justru hendak bermain-main.

Itulah gambaran pentas teater bertajuk “Menjaring Malaikat” yang dilakoni oleh Jamaluddin Latif dalam Festival Teater Jakarta yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Selasa (29/11/2016). Menjaring Malaikat

adalah pertunjukan aktor tunggal karya Jaring Project. Lakon yang menceritakan kegelisahan wong cilik di tengah carut-marut konflik elite negara ini mengambil ide dari cerpen Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat karya Danarto.

“Ada tokoh Jibril yang berperan santai dan suka bercanda, namun tanpa meninggalkan kesannya yang agung. Lakon ini dengan mudah bermain-memainkan peristiwa genting umat manusia menjadi semacam humor sekaligus satire,” kata Sutradara pertunjukan tersebut, Ibed Surgana Yuga.

Teater “Menjaring Malaikat” seolah menjadi cerminan atas apa yang terjadi di Tanah Air saat ini. Sosok penguasa yang diandalkan untuk mengubah kondisi masyarakat kalangan bawah, justru tak menggubris. Bahkan, mereka justru terjebak dalam berbagai polemik, termasuk tindakan rasuah.

Seperti yang dikatakan Ibed,

Melalui teater tunggal bertajuk “Menjaring Malaikat”, Jaring Project memberikan sentilan halus atas carut-marut konflik elite negeri ini.

teater “Menjaring Malaikat” menyusun aroma surealis namun dapat dipertunjukkan secara realistis. Aktor tunggal dalam pertunjukan ini diposisikan sebagai manusia yang bisa membelah diri menjadi banyak sosok. Selain melakonkan dua tokoh utama, tukang kebun dan malaikat, terdapat pula beberapa tokoh sampingan, yakni bapak guru dan murid-murid sekolah dasar (SD). (*)



MENGSELITIK- Salah satu adegan dalam pentas teater “Menjaring Malaikat” yang penuh dengan kritik sosial, Selasa (29/11/2016).

JARINGPROJECT.COM

KARENA ADA TIKUS DI SINI

hai, para koruptor,
tingkahmu seperti tikus
apakah kau tak sadar?
apakah kau tak malu?
bahwa kebiasaanmu
sangat menjijikan

kerjaanmu hanya mengikis uang negara
layaknya tikus

mana hati nuranimu?
apakah kau tidak kasihan terhadap negara
kegiatanmu ini hanya bisa merugikan negara
tidakkah kau sadar
tidakkah kau malu

tikus-tikus sepertimu ini patut dimasukan *bui!*

Yizreel Padma
Peserta didik Paket C (setara SMA)
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Anugrah Bangsa
Kota Semarang

KORUPTOR

Kau yang berpakaian rapi
Mengandalkan profesi
Berkalungkan dasi
Yang menggerus semua hak kami

Koruptor yang terus makan uang kotor
Penyebab atas kami si miskin
Penjilat atas apa milik kami
Tak peduli atas apa kami hidup

Kau bedebah berdasi
Orang pintar yang terus membodohi rakyat kecil
Yang terus menjerit atas kemiskinan

Desi Muliasari
(Banjarnegara)

CERDIK

Wkwkwkwkwkwkwk
Wkwkwkwkwkwkwk
Permainanmu cantik
Lembut, halus

Wkwkwkwkwkwkwk
Benang merah terjulur ke atas

Wkwkwkwkwkwkwk
Sayang.....
Itu bukan milikmu.....

MAFIA

Hijau, merah
Mafia aktor
Memainkan drama
31, 1999
20, 2001

Satu gertakan tak rasa
Dua gertakan tak berarti
Tiga..... tak wajar
Subhannallah
Menggoyahkan karakter bangsa
Memutarbalikan fakta
Membenarkan opini
Prestasi yang bagus

Karya Iga Pamungkas
(Kelas XII SMAN 1 Purwareja, Banjarnegara)





KOMPETISI- Ketua WP KPK Novel Baswedan menyerahkan piala kepada salah satu pemenang cabang olahraga, Jumat (11/11/2016).

INTEGRITO

CARA PEGAWAI KPK MENGUSIR LELAH

Bergelut dengan pekerjaan sehari-hari, terkadang menimbulkan rasa penat dan bosan. Hal tersebut tentu wajar dialami oleh para pegawai, tidak terkecuali pegawai KPK.

Sadar akan hal itu, Wadah Pegawai KPK (WP KPK) kemudian berinisiatif menggelar berbagai kegiatan di luar kedinasan. Salah satunya, yakni melalui ajang Wadah Pegawai Cup (WP Cup). Dalam ajang tersebut, WP KPK memfasilitasi para pegawai yang memiliki hobi berolahraga, untuk turut serta dalam kejuaraan antar-unit kerja yang ada di KPK.

Dalam ajang WP Cup 2016 ini, sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan adalah futsal, sepak bola, tenis meja, catur, *game console*, bola basket, bola voli, dan bulu tangkis. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin-Jumat (18/8-11/11/2016).

Dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan itu, panitia WP Cup menjangking juara 1 sampai 3 dari masing-masing cabang olahraga. Dalam ajang itu, sejumlah tim memperebutkan piala untuk juara 1-3, dan piala bergilir. (*)

Pemenang WP Cup 2016:

No	Cabang	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Futsal	Biro Umum	Biro Renkeu	Bag. Pengamanan PTT
2	Sepak Bola	Setjen	Dit. Penindakan	Bag. Pengamanan
3	Tenis Meja	Dit. Penyidikan	Dit. LHKPN	Biro Umum
4	Catur	Martua	Carwan	
5	Game Console	Biro Umum	Penyidikan	Biro Humas
6	Bola Basket Putra	Labuksi	Biro Renkeu	Dit. Gratifikasi
7	Bola Basket Putri	Setjen	INDA	Dit. Dikyanmas
8	Bola Voli Putra	Rutan	Security Os	Dit. Penyidikan
9	Bola Voli Putri	Setjen	PIPM	INDA
10	Bulu Tangkis Putra	Driver	Setjen	Dit. Penyelidikan
11	Bulu Tangkis Putri	Nur Chusniah/Patty Ambar	Anggi Aldila/Sheli	Aulia Fadjri/Lely



FOTO2: DOK BALEBENGONG

BALEBENGONG

MEMBANGUN SPIRIT JURNALISME WARGA

BALEBENGONG.NET DIBANGUN SEBAGAI TEMPAT BERBAGI INFORMASI SEMUA TENTANG BALI. DIKELOLA SECARA PARTISIPATIF OLEH SIAPA PUN YANG PEDULI DAN INGIN BERBAGI INFORMASI.

“**A**da suara-suara tidak terdengar di dalam kopi pahit Dadong Koda,” begitulah I Wayan Wilyana, pekerja seni sekaligus pemilik kios kecil kerajinan rotan dan bambu, memulai cerita. Selain berbelanja,

lanjut Wilyana dalam tulisannya, warga atau siapapun sering berbagi cerita, mengeluh, menyombongkan diri, atau menyanyikan beberapa kidung sesukanya.

Feature apik berjudul *Suara Berbeda di Warung Dadong Koda* tersebut, memang teramat menggelitik. Melalui tulisannya, Wilyana berkisah tentang warung Dadong Koda, satu dari sangat sedikit warung lokal di Batubulan, Gianyar, yang tetap bertahan dari gempuran toko-toko modern yang semakin menjamur. Tak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa warung Dadong Koda adalah saksi perubahan sosial dan ideologi di Bali sejak 1965 sampai sekarang. Itu sebabnya, warung

tersebut juga menjadi tempat melepas rindu terhadap suasana masa lalu.

Tulisan itu memang menarik. Tidak kalah “menggigit” dibandingkan karya para jurnalis profesional. Disajikan dengan gaya bahasa ringan, mengalir, serta deskripsi yang detail, tak heran jika Sloka Institute dan Bali Blogger Community (BBC), pengelola portal BaleBengong pun memberi Anugerah Pewarta Warga 2016 untuk kategori tulisan.

Wilyana hanya satu dari sekian anggota masyarakat yang memanfaatkan BaleBengong sebagai medium jurnalisme warga. Melalui balebengong.net, mereka seakan berlomba memberikan informasi sekaligus aspirasi lewat karya jurnalistik. Melalui komunitas dan portal yang lahir pada 2007 itu, warga juga bebas mengetahui dan memilih informasi yang mereka butuhkan.

Menurut Luh De Suryani, pengelola BaleBengong, portal tersebut memang dibuat untuk mewujudkan jurnalisme warga Bali, khususnya Denpasar. Dengan demikian informasi yang disajikan pun, merupakan informasi yang dikirim warga atau masyarakat.

Sebagai medium jurnalisme warga tentu saja BaleBengong dikelola oleh warga, dari warga, dan untuk siapa saja. Sebagai aliran baru dalam jurnalisme, yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, jurnalisme warga merupakan alternatif dari media umum yang sudah ada.

“Jadi warga tidak hanya menjadi konsumen media tapi juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan informasi itu sendiri mulai membuat, mengawasi, mengoreksi, menanggapi, atau sekadar memilih informasi yang ingin dibaca,” ujar Suryani. Karena itu, lanjutnya, jurnalisme warga tidak hanya memberi tempat tapi juga menyarankan dan mendorong pembaca untuk terlibat di dalamnya.

Kaidah Jurnalistik

Selayaknya medium jurnalisme warga, BaleBengong menampung semua informasi yang disampaikan. Warga bisa menulis apapun yang ingin mereka tulis. Mulai dari hal paling sepele tentang diri sendiri, kata Suryani, maupun tentang masalah paling serius. Bisa menulis hobi, gaya hidup, kuliner, adat, budaya, agama, peristiwa, opini, agenda, atau apa saja yang dianggap menarik untuk dikemukakan di BaleBengong. Semua informasi tersebut, lanjut dia, bisa dikirim langsung via email ke alamat info@sloka.or.id. “Kami memang ingin mendapatkan berita atau in-



Citizen Journalism Day 2016- Rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka Anugerah Pewarta Warga, Sabtu (12/11).

BALEBENGONG.NET

formasi yang akurat, atau mendapatkan dari narasumber langsung,” kata Suryani.

Begitupun, sebagaimana karya jurnalistik, BaleBengong tetap memberi batasan mengenai informasi yang bisa dilaporkan. Yang paling penting, lanjut Suryani, bahwa informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau berdasarkan wawancara imajiner. Untuk itulah, selayaknya media massa profesional, sebelum tulisan dimuat di balebengong.net, maka dilakukan proses editing terlebih dahulu. Konsekuensinya, selayaknya media profesional pula, tidak semua tulisan yang masuk ke meja redaksi pasti dimuat di blog BaleBengong.

Dalam konteks ini Suryani menegaskan, hak pemuatan memang berada pada editor. Editor, lanjut dia, berhak mengedit, terutama dalam hal konten serta ejaan. Tentu saja tulisan yang bersifat menghasut, menyenggung, serta mengandung kekerasan dan pornografi sangat mungkin tidak akan dimuat. “Sementara untuk informasi yang bersifat koreksi,



klarifikasi, ataupun penilaian lain, warga harus menyebutkan identitas dan keterangan jelas. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungugutan terhadap informasi yang disampaikan,” kata Suryani.

Lantas, bagaimana mengenai pendanaan operasional portal? Ini yang menarik. Sebab, BaleBengong merupakan portal non-profit yang tidak mengejar keuntungan. Itu sebabnya, dalam konteks ini, jelas Suryani, BaleBengong tidak mendapatkan atau mengeluarkan dana, baik saat membuat portal berita ataupun untuk roda operasionalnya.

“Karena untuk membuat (portal) ini, BaleBengong hanya mengelola dan membuat semua bersama-sama dengan tim. Semua hanya bermodal internet dan bersifat suka rela. Semua partisipan di BaleBengong juga tidak mendapatkan uang sepeser pun. Bahkan pembuatan portal ini pun *free* alias gratis,”

lanjut Suryani.

Ia menambahkan, melalui pengelolaan non-profit dan serba gratis, BaleBengong ingin menunjukkan bahwa informasi bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Menurutnya, konsep tersebut disampaikan kepada warga, sehingga mereka juga tahu bahwa ketika tulisan dimuat, warga tidak memperoleh honor pemuatan. “Semua kontributor portal ini sepakat bahwa informasi seharusnya bisa dibagi dengan suka rela,” kata Suryani.

Meski demikian, BaleBengong tidak melarang, jika terdapat warga yang meminta tulisan mereka yang sudah diedit untuk dikirim kepada media lain. Sebab, pada prinsipnya, tulisan tersebut memang menjadi hak penulis. “Kami sepenuhnya memberi kebebasan, termasuk jika media lain tersebut memberikan honor kepada penulis,” kata dia.

Namun Suryani menambahkan, sistem yang berlaku tentu selalu dinamis. Bahkan ke depan, BaleBengong berharap bisa mendorong sistem yang membuat warga lebih aktif bersuara, mencoba medium-medium baru yang lebih mudah diakses, dan melakukan pendampingan bagi kontributor yang lebih intens untuk isu spesifik. “Kami juga ingin menjangkau suara-suara di Nusantara tak hanya Bali,” harap Suryani. (*)

DEWI LESTARI

JENDELA KEJUJURAN

Penyanyi dan novelis Dewi Lestari mempunyai kebiasaan unik dalam mengajarkan kejujuran kepada buah hatinya. Melalui jendela kejujuran, kesempatan diberikan.

Setiap orangtua tentu mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anaknya. Tak terkecuali bagi penyanyi dan novelis Dewi Lestari. Di keluarga kecilnya, dia dan sang suami memiliki cara unik dalam mengajarkan prinsip jujur pada dua orang anaknya. Namanya, jendela kejujuran.

Ya, bagi anak-anak Dewi, Keenan Avalokita Kirana (12) dan Atisha Prajna Tiara (7), istilah tersebut begitu familiar. Maklum, melalui jendela kejujuran, mereka belajar bersikap jujur termasuk ketika melakukan kesalahan. "Jadi, ketika saya dan suami meminta keterangan dari anak-anak, itu ada yang namanya jendela kejujuran selama lima menit. Itu adalah waktu dimana mereka memilih jujur atau tidak," kata Dee, panggilan akrabnya.

Dee menjelaskan, jika dalam lima menit anaknya memilih jujur atas keterangannya, maka mereka bisa lolos dari konsekuensi. "Tetapi kalau memilih berbohong, dan di kemudian hari kita mengetahui, kebohongan itu, maka ada konsekuensi sendiri. Dan itu sudah saya terapkan sejak dua tahun lalu," kata perempuan kelahiran Bandung, 20 Januari 1976 itu.

Meski demikian, penulis buku *Supernova* dan *Perahu Kertas* itu mengatakan, tidak ada penghargaan atau hukuman khusus atas sikap yang diambil anak-anaknya tersebut. Itu dimaksudkan agar anak-anaknya terbiasa memiliki pendirian. "Ketika mereka (anak-anak) melakukan kesalahan dan tidak dimarahi, mungkin menurut mereka itu merupakan suatu *reward* dan mereka juga senang. Tetapi kalau pada akhirnya mereka ketahuan bohong, ya kita peringatkan," katanya.

Dee mengaku senang, karena cara mendidik yang diterapkan dikeluarganya tersebut berjalan efektif. "Bahkan, sekarang kalau mereka merasa bikin kesalahan, mereka sendiri yang meminta jendela kejujuran itu," ujarnya. (*)



DOK. PRI

Hidup Sederhana dan Berbagi Gaji

Tahukah? Seorang pemimpin sebuah negeri hampir dipastikan akan mendapatkan fasilitas serba wah dan bergaji tinggi. Namun, ternyata tidak semua pemimpin mau menikmati fasilitas yang sejatinya menjadi hak mereka. Menempatkan diri sebagai “orang biasa” seperti rakyatnya adalah keseharian mereka. Bagi mereka, tak perlu fasilitas dan hidup mewah karena menjadi pemimpin berarti menjadi pejabat yang bertugas melayani rakyat.



FOTO-FOTO: IST

Para pemimpin yang tampil sederhana tersebut di antaranya adalah Fernando Lugo, presiden Paraguay. Selama menjadi presiden, Lugo memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Ia juga selalu berpakaian sangat sederhana, cukup berke-*meja*. Saat dilantik menjadi Presiden Paraguay pada 2008, ia langsung menyatakan tidak akan menerima gajinya sebagai presiden sebesar 4.000 AS dollar per bulan. “Saya tidak membutuhkan gaji itu yang sebetulnya hak kaum miskin,” katanya.

Sikap Lugo tak seketika demikian memang, karena sebelum menjadi presiden, ia sudah dijuluki “pastor kaum papa”. Julukan itu disematkan publik karena ia adalah pastor yang sangat getol membela kaum tertindas. “Bila ada hal yang paling menyakitkan saya, maka itu adalah ketidakadilan dan terutama sekali ketidakadilan sosial,” kata Lugo yang lengser pada 22 Juni 2012 karena dikudeta oleh sayap kanan melalui Parlemen Paraguay.

Pemimpin dari daratan Amerika Latin lainnya yang menunjukkan karakter tak jauh berbeda dengan Lugo adalah Presiden Uruguay Jose ‘Pepe’ Mujica. Ia memenangkan pemilu tahun 2009 dan resmi menduduki jabatan presiden pada Maret 2010. Sejak terpilih, Mujica tetap memilih tinggal di rumahnya di pinggiran Kota Montevideo. Di rumahnya itu tidak ada pelayan. Hampir semua pekerjaan rumahnya, seperti memasak, dikerjakan sendiri.



Mujica yang pernah 14 tahun dipenjarakan karena aktivitas gerilya melawan kediktatoran ini, selama menjadi presiden menyumbangkan 90 persen gajinya untuk menambah anggaran sosial di Uruguay. Pada tahun 2010, kekayaan pribadinya tak lebih dari 1.800 AS dollar atau sekitar Rp18 Juta. Ia juga hanya menggunakan mobil Volkswagen Beetle keluaran 1987, bahkan sempat mengendarai motor Vespa saat bertugas.



Sementara itu, dari Benua Afrika ada Nelson Mandela. Dia merupakan pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan *apartheid*. Namanya begitu termasyhur di seluruh penjuru Afrika dan dunia. Meski demikian, ia tetap menjadi sosok sederhana. Rumahannya di Johannesburg maupun di desa asalnya, Qunu, terbilang sederhana tak ubahnya dengan rumah penduduk setempat lainnya.

Ketika resmi menjadi Presiden Afrika Selatan pada 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Selanjutnya, ia bahkan menyerahkan sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak.

Tidak hanya itu, ketika negerinya didera utang warisan rezim sebelumnya, Mandela menyerukan para pejabat Afrika Selatan mengencangkan ikat pinggang. Sebagai langkah awal, ia memulai dengan memotong gajinya sendiri dan gaji wakil presiden. (*)

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Menduduki jabatan dan posisi strategis, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara (PN) lainnya, menjadi prestasi yang tidak saja harus disyukuri tetapi juga harus dijaga dengan baik. Namun, tak jarang PNS/PN, yang terjebak dalam praktik korupsi karena menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Di antara mereka ada yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan yang notabene jelas-jelas termasuk korupsi.

Kategorisasi menjadi tindak pidana korupsi karena sebagaimana rumusan “korupsi” pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: (1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; (4) Uang atau surat berharga; (5) Yang disimpan karena jabatannya.

Bagi PNS/PN yang melanggar Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan

paling banyak Rp750 miliar.

Selanjutnya, pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa PN memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi juga termasuk dalam tindak korupsi. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: (1) PN atau orang selain PN yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu; (2) Dengan sengaja;

(3) Memalsu; (4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ini diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 miliar.

Masih terkait ancaman bagi PNS/PN yang menyalahgunakan jabatannya terdapat pada Pasal 10 huruf a, b, dan c, yakni mengenai pegawai negeri yang merusakkan bukti termasuk korupsi. Bagi PNS/PN yang dengan sengaja menggelapkan, merusakkan, menghancurkan,

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang dan yang dikuasainya karena jabatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

Ancaman pidana serupa juga berlaku bagi PNS/PN yang membiarkan orang lain merusak bukti dana atau membantu orang lain merusakkan bukti karena dua perilaku ini termasuk kategori korupsi. (*)





AGUS RAHARDJO TAK BERLARI BERSAMA SIPUT

Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Pepatah itu agaknya belum berlaku bagi pelaku korupsi. Pelaku tindak kriminal di bidang ini, semakin hari semakin pandai menyasati praktiknya. Berbagai kedok dan modus baru terus bermunculan. Karena itu, penegak hukum, khususnya KPK, tidak boleh kalah trengginas dibanding para koruptor.

Era sekarang, korupsi tidak lagi disamarakan dalam bentuk mesin cuci seperti era mafia di Amerika era Al Capone. Juga tidak lagi melulu di tabung, atau disimpan dalam bentuk tunai di rumah. Mungkin kita tak seburuk Italia yang tingkat korupsinya begitu akut, hingga melahirkan fenomena “*Tangentopoli*”, yakni praktik korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat.

Tentu, kita sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi di negeri moyangnya korupsi itu melanda Indonesia juga. Karena itulah, untuk mencegah maraknya tindak pidana korupsi di sektor strategis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya memperkenalkan aplikasi JAGA. Aplikasi ini menjadi representasi kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang bersih dan transparan. Aplikasi ini milik bersama, milik rakyat Indonesia yang harus dirawat dan dijaga keberadaannya, bukan hanya sekadar program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK. Aplikasi JAGA bisa diunduh melalui *play store* pada telepon selular berbasis android. Saat ini JAGA memuat empat pemanfaatan layanan publik, yakni sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan. Ke depan, diharapkan makin banyak lagi layanan publik yang masuk ke JAGA, misalnya JAGA APBN-ku, JAGA APBD-ku, JAGA STNK-ku,

dan lain-lain.

Misalnya pada layanan JAGA Sekolah, masyarakat bisa mengecek profil dan fasilitas sekolah, termasuk anggaran yang dikelola. Cek Rumah Sakit dan Cek Puskesmas, masyarakat bisa mengecek profil, tenaga dokter, jumlah kamar yang tersedia dan menyampaikan keluhan serta berdiskusi di forum yang tersedia. Sementara Cek Perizinan, selain bisa mengetahui jenis dan persyaratan perizinan, atau mengecek status izin, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan secara online.

Ketiga sektor strategis tersebut mengelola anggaran yang besar. Misalnya, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 5 persen untuk kesehatan. Pada 2016, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 428 triliun untuk pendidikan dan Rp 106 triliun untuk kesehatan. Tak heran, tingkat korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan misalnya, juga masih cukup tinggi.

KPK sangat *concern* dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk ikut mendukung pemerintah dalam mencegah korupsi. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui desain sistem yang memiliki keamanan tinggi akan mempersempit celah-celah untuk melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, peningkatan partisipasi publik dalam melakukan fungsi supervisi pemerintah pun bisa digalakkan melalui pemanfaatan teknologi.

Tanpa pemanfaatan teknologi, penanggulangan korupsi akan tertinggal semakin jauh. Ibaratnya pencegahan dan pemberantasan korupsi berlari bersama siput, sementara pelaku korupsi naik pesawat jet *supersonic*. Jelas akan selalu tertinggal. Dan, untuk bisa mengejar itu, teknologi informasi salah satu yang bisa diandalkan. (*)

Sudahkah Kita Jujur pada Diri Kita Sendiri?



**biar KECIL
tetep NGAMBIL!**

